



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG

SKRIPSI



**SRI RAHAYU JULIANTI
07951004**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS

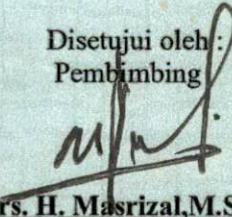
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Dengan ini Dekan Fakultas Ekonomi, Ketua Jurusan Ekonomi dan Pembimbing Skripsi Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas menyatakan bahwa :

Nama : **SRI RAHAYU JULIANTI**
BP : 07 951 004
Program Studi : S1 (Strata 1)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Jalur : Ekonomi Sektor Publik dan Keuangan Daerah
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang**

Telah diseminarkan dan disetujui skripsi ini melalui Seminar Hasil Skripsi yang diadakan pada tanggal 2 Mei 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku.

Disetujui oleh :
Pembimbing


Drs. H. Masrizal, M.Soc.Sc
NIP. 1958021111987021003

Dekan
Fakultas Ekonomi

Prof.Dr.H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 195410091980121001

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi


Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE, M.Ec.DEA. Ing
NIP. 130 812 952



Dengan Rahmat dan Kasih-Mu jualah
Pada hari ini dapat aku persembahkan
Karya kecilku yang amat berharga
Sebagai bukti bahwa telah Engkau dengarkan
Untaian do'a dan pengharapan dari orang-orang terkasih
Sebagai ungkapan rasa syukurku pada nikmat-Mu

Dengan iman hidup lebih terarah
Dengan seni hidup lebih indah
Dengan ilmu hidup lebih mudah
(Qs. An Nahl : 125)

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu
Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat
Dan Allah Maha Mengetahui apapun yang kamu kerjakan"
(Qs. Al-Maidah : 11)

Dalam serba kesederhanaan kucoba meraih kebahagiaan
Dalam ceria berbaur duka kucoba meraih cita-cita
Hari ini secerah harapan telah kugenggam, sepenggal asa telah kuraih
Kau berikan aku kesempatan untuk membahagiakan orang-orang
Yang kucintai dan menyayangiku, namun.....
Esok atau lusa masih mengharapkas kasih dan ridho-Mu

Aku bersujud dihadapan-Mu ya Allah
Sebagai rasa syukurku atas segala rahmatMu
Kupersembahkan untuk yang kucintai Papa Mama
Adikku Andi dan Siska
Seseorang yang selalu qu sayang (RR), Seluruh keluargaku tersayang,
Terima kasih atas semua yang telah diberikan cinta, kasih sayang
Dan pengorbanan yang tulus, do'a, airmata dan tetesan keringatmu
Semua adalah kekuatanku

By _ Sari

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah yang secara tertulis disebutkan dalam daftar referensi.

Padang, Mei 2011

Sri Rahayu Julianti

07 951 004



No. Alumni Universitas	SRI RAHAYU JULIANTI	No. Alumni Fakultas
------------------------	---------------------	---------------------

BIODATA

a). Tempat/Tgl lahir : Rengat, 15 Juli 1989 b). Nama Orang Tua : H. Abdul Razak, SH dan Hj. Yendratati c). Fakultas : Ekonomi d). Ilmu Ekonomi e). No.Bp : 07 951 004 f). Tanggal Lulus : 2 Mei 2011 g). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h). IPK : 3,00 i). Lama Studi : 3 tahun 8 bulan j). Alamat Orang Tua : Jl.Azki Aris Gg Taqwa No. 1 Rengat-Riau

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG

Skripsi S1 Oleh : Sri Rahayu Julianti Pembimbing : Drs. H. Masrizal,M.Soc.Sc

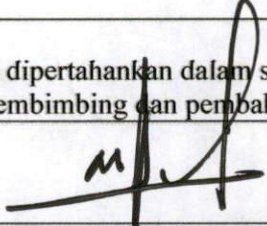
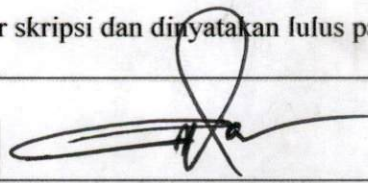
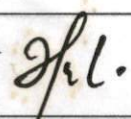
ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis perkembangan penerimaan retribusi pasar dan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan retribusi Kota Padang. Adapun alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan untuk mengestimasiya menggunakan kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square*). Data yang digunakan adalah data sekunder dengan periode analisisnya dari tahun 1995-2009, dimana data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat dan Dinas Pasar Kota Padang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya selama tahun 1995-2009 adalah sebesar 8,15 persen. Dimana variable PDRB dan jumlah toko memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan retribusi pasar. Variabel independen yang paling berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar di Kota Padang adalah variabel PDRB.

Keywords :Retribusi Pasar, PDRB, Jumlah Toko.

Skripsi ini telah dipertahankan dalam seminar skripsi dan dinyatakan lulus pada 2 Mei 2011, telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas :

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. H.Masrizal,M.Soc.Sc (Pembimbing)	Drs.H.Zulkarnain Ras,MSi (Pembahas I)	Zulkifli, SE, MSi (Pembahas II)

Mengetahui :

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi :

Prof.Dr.H. Firwan Tan, SE,M.Ec,DEA.Ing
NIP. 130 812 952


Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Universitas Andalas dan mendapat alumnus :

	Petugas Fakultas / Universitas Andalas	
Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :
Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Di Kota Padang”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ekonomi Universitas Andalas Padang. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan tenaga, materi, informasi, waktu, maupun dorongan yang tidak terhingga dari berbagai pihak. Karena itu dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. **Ayahanda dan Ibunda tercinta H. Abdul Razak, SH dan Hj. Yendratati** yang telah memberikan pengorbanan, nasehat, doa, dan dukungan yang tiada hentinya sehingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
2. **Bapak Prof.Dr.H.Syafruddin Karimi, SE,MA,** selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. **Bapak Prof.Dr.H.Firwan Tan,SE,M.Ec.DEA.Ing,** selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.

4. **Ibu Neng Kamarni, SE,M.Si**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Program Ekstensi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
5. **Bapak Drs.H.Masrizal,M.Soc.Sc**, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, nasehat, dan petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Drs.H.Zulkarnaini Ras, MSi** dan **Bapak Zulkifli N, SE, MSi**, selaku dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam seminar hasil sekaligus memberikan bimbingan, petunjuk serta saran-saran yang sangat berarti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmunya hingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha/Sekretariat/Pustaka Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah membantu penulis dalam kelancaran proses administrasi selama kuliah hingga selesai studi ini.
9. Adik-adik ku tercinta Andi n Siska..to: Andi “bukan waktunya lagi bermain-main...,Ayooo kejar cita-citamu dek..” to: Siska..adik bungsuku yang paling imoeet..hehehe...”jangan online terus sayang...belajar yang rajin....”Keluarga besarku tersayang : nenek dari mama,,nenek n ata dari papa,,keluargaku yang lainnya yang tidak bisa

disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

10. Tika (angah), cia (amay alias comai), fanny (amak), au (inyiak), olga (mbah) ice, adckx, ika (mak njang)..☺ Thanks for all...you're the best friends... ☺ special for au...."keep ur spirit n cepet nyusul wisuda juga iaah inyiakk...hehehehehe"
11. Teman-teman IE FE-PEUA yang wisuda bareng : Vivi, kak nova, kak paskah, kak nel, bg budi. Congratulation for us...hehehe
12. Teman-teman IE FE-PEUA 07: novi, ii, tia, ari (dedi), risky (udin), mas agung, bg heru, bg daf, bg ade, olga doank, dilla, yana dll...chayooooooooooooo teman-teman.....!!!!
13. Someone special for me...*Rikky*.."thanks for your spirit..for everything...cepet nyusul iaahaaah,,,"
14. Teman-teman n adik-adik yang merantau dari Rengat ke Padang untuk menuntut ilmu demi menggapai cita-cita : Widya, Lia, Nindi, Kholida, Gorby, Robby, n teman-teman semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu..."Don't give up n success for us....."
15. Kakak-kakak dan adik-adik FE-PEUA yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas pengorbanan dan budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Segala bentuk kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini

penulis terima dengan lapang dada dan penulis ucapkan terima kasih. Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini semoga bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Mei 2011

DAFTAR ISI

Penerimaan Retribusi Daerah 19

2.1.4.2.5 Jenis dan Kriteria Retribusi Daerah	20
2.1.4.2.6 Klasifikasi Retribusi Daerah	22
2.1.4.2.7 Fungsi Retribusi Daerah	25
2.1.4.3 Retribusi Pasar	26
2.1.4.3.1 Pengertian Pasar	26
2.1.4.3.2 Pengertian Retribusi Pasar	27
2.1.4.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar	28
2.1.4.3.4 Jenis-jenis Retribusi Pasar	29
2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto	30
2.2 Studi Literatur	32
2.3 Hipotesis	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis dan Sumber Data	38
3.2 Variabel Penelitian	38
3.3 Definisi Operasional Variabel	38
3.4 Metode Penelitian	40
3.4.1 Metode Kuantitatif	40
3.5 Metode Analisis Data	40
3.5.1 Pembentukan Model	40
3.5.2 Pengujian Model	42
3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)	42
3.5.2.2 Pengujian t-Tes	42
3.5.2.3 Pengujian F-Tes	43
BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	45
4.1 Gambaran Umum Kota Padang	45
4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang	46
4.3 Gambaran Umum Pasar Kota Padang	47
4.3.1 Fasilitas Pasar	48
4.3.2 Tarif Retribusi Pasar	52
4.4 SDM Pengelola	54

4.5 Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar	56
4.6 Tingkat Efektifitas Retribusi Pasar.....	60
4.7 Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar	
Kota Padang.....	61
4.7.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	62
4.7.2 Jumlah Toko	64
BAB V ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI	
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR.....	67
5.1 Analisis Regresi.....	67
5.2 Koefisien Determinasi (R^2)	67
5.3 Uji t-Tes.....	68
5.4 Uji F-Tes.....	71
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
6.1 Kesimpulan.....	73
6.2 Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	ix
LAMPIRAN	xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Padang Tahun 1995 - 2009	3
Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang Tahun 2000 – 2009 ..	46
Tabel 4.2. SDM Pengelola Retribusi Pasar di Kota Padang Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2010	55
Tabel 4.3. Perkembangan dan Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Padang Perkomponen Tahun 1995 – 2009 (Dalam Ribuan)	57
Tabel 4.4. Perkembangan Kontribusi Pos-pos Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap Total Retribusi Pasar Kota Padang (%) Tahun 1995–2009.	58
Tabel 4.5. Perkembangan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar Terhadap PAD Tahun 1995-2009 (Dalam Ribuan)	59
Tabel 4.6. Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang Tahun 2005-2009	61
Tabel 4.7. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2000 Serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 1995 - 2009	62
Tabel 4.8. Perkembangan Jumlah Toko Tahun 1995 - 2009 Kota Padang	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Sebagaimana daerah kabupaten dan kota lainnya di Indonesia, Kota Padang juga mengandalkan sumber pendapatan daerah untuk menunjang pembangunan yakni untuk menutupi pembiayaan yang diperlukan bagi

pemerintah Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu sumber pendapatan daerah yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah, meskipun ada empat komponen PAD namun yang lebih dominan dan lebih rasional untuk dijadikan sumber PAD adalah pajak dan retribusi daerah sedangkan penerimaan dari laba BUMD dan penerimaan lain-lain yang sah pada prinsipnya dapat dikatakan sebagai aksesoris PAD untuk menampung berbagai kemungkinan penerimaan dari pengelolaan kas dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut UU No 34 Tahun 2000, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Defisini tersebut menunjukkan adanya timbal balik langsung antara pemberi dan penerima jasa. Hal ini berbeda dengan pajak, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Dari beberapa Pendapatan Asli Daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan daerah terpenting disamping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah Retribusi Pasar.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Padang
Tahun 1995-2009

Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	Pertumbuhan (%)
1995	2,048,767,000	-
1996	2,216,154,000	8.17
1997	2,242,968,000	1.21
1998	2,650,265,000	18.16
1999	3,275,775,000	23.60
2000	3,449,570,000	5.31
2001	3,575,595,000	3.65
2002	3,721,418,590	4.08
2003	5,208,780,570	39.97
2004	5,441,572,540	4.47
2005	5,560,148,780	2.18
2006	5,754,094,880	3.49
2007	5,771,891,090	0.31
2008	5,826,912,210	0.95
2009	5,784,963,010	-0.72
Rata-rata		8,15

Sumber : Dinas Pasar Kota Padang, Data Diolah

Dari tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa penerimaan retribusi pasar Kota Padang dari tahun 1995 – 2009 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi (naik-turun), dengan rata-ratanya tercatat sebesar 8,15%. Dilihat dari potensi Kota Padang, perdagangan dan jasa merupakan sector unggulan di Kota Padang dan Pasar merupakan pusat perdagangan di Kota Padang yang merupakan bagian terpenting dari perputaran ekonomi daerah. Dimana pasar merupakan suatu unit usaha yang memiliki peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat, dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu

kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Kota Padang. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemerintah Kota Padang untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Dengan demikian, dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar dapat dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar sehingga dapat menggali dan mendayagunakan potensi yang ada seoptimal mungkin. Melihat permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis dengan judul penelitian: **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR DI KOTA PADANG”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perkembangan Retribusi Pasar Kota Padang selama periode 1995-2009?

2. Seberapa jauh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Toko secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang selama periode 1995-2009 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang selama periode 1995-2009.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang paling berpengaruh terhadap penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Toko selama periode 1995-2009

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Dinas Pasar, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber Retribusi Pasar Kota Padang agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemkot Padang untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar

3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang dari tahun 1995-2009. Variabel yang diduga dapat mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Toko, dan variabel tersebut yang akan digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini. Data diperoleh dari Dinas Pasar Kota Padang dan BPS Propinsi Sumatera Barat. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah disusun oleh lembaga / badan / dinas tersebut di atas.

1.6 Sistematika Penelitian

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang (1995 - 2009), akan dibagi atas beberapa Bab Pembahasan sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini memperlihatkan secara garis besar dari studi ini yang meliputi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

Bab ini berisi landasan teori dan pendokumentasian atau pengkajian hasil dari penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama. Landasan teori ini berisi teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka dan hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan penjelasan dan pembahasan mengenai jenis dan sumber data beserta metode analisa yang digunakan dalam penelitian

Bab IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Bab ini berisikan gambaran secara umum atas subjek penelitian

**Bab V ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR**

Bab ini berisi semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian

Bab VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN STUDI LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Dalam rangka kebijakan keuangan daerah maka diperlukan peranan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat terus meningkatkan pendapatan daerah. Karena untuk dapat mewujudkan pembangunan yang mantap dan berkesinambungan diperlukan adanya ketersediaan dan pembiayaan yang besar, baik untuk rutin maupun untuk pembangunan. Sehingga perlu dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan dana dari sumber pemerintah ke pemerintah daerah yang berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui peningkatan dana masyarakat. APBD merupakan pencerminan keuangan daerah yang ada di suatu pemerintah daerah dalam membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu perlu terus ditingkatkan melalui berbagai program peningkatan dan pengembangan keuangan daerah. Program-program ini meliputi usaha-usaha peningkatan peranan daerah dalam pembangunan daerah, peningkatan efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pemantapan manajemen keuangan daerah (Rustian Kamaludin, 1992). Selain itu keuangan daerah memiliki arti yang sangat penting bagi kestabilan pemerintah. Menurut Alfian Lains (1985) keuangan daerah pada umumnya memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Sangat minimnya porsi pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan guna kepentingan umum di daerah.

2. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari sumbangan atau subsidi serta bantuan pemerintah pusat.
3. Kontribusi pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya terhadap penerimaan total sangat kecil, karena hampir semua pajak di daerah dijadikan pajak sentral yang dipungut pemerintah pusat.
4. Kontrol yang luas dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Diharapkan semua karakteristik keuangan daerah diatas yang menyebabkan lemahnya peran keuangan daerah, dapat diatasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang lebih mengedepankan peran keuangan daerah sebagai sumber pembiayaan utama.

Pemerintah daerah perlu untuk meningkatkan dan menyempurnakan pengelolaan keuangan yang meliputi (Rustian Kamaludin, 1992) :

- a. Mobilisasi dana yang dapat digali dari potensi daerah sendiri secara wajar, tertib dan dengan tetap berwawasan kesatuan dan berlandaskan prinsip otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.
- b. Perlu desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program serta pengambilan keputusan dalam memilih proyek-proyek daerah dan pelaksanaannya.
- c. Penyempurnaan pelaksanaan subsidi, bantuan dan pinjaman yang dapat mendorong peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat daerah setempat.
- d. Peningkatan kemampuan berorganisasi pemerintah daerah, khususnya di bidang keuangan daerah dan tetap diarahkan untuk mewujudkan otonomi

yang nyata dan bertanggung jawab, yang meliputi: personalia, manajemen dan struktur organisasi.

- e. Usaha memperkuat sistem pemantauan daerah yang efektif sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber-sumber ekonomi dan dana yang terbatas untuk pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang optimal.

Sehingga dapat dikemukakan bahwa pemerintah daerah tidak akan melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan. Keuangan daerah inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri (S. Pramudji, 1980).

Menurut Tjahja Supriatna (1992), definisi keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah "Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)".

2.1.2 Kriteria Sumber Penerimaan Daerah

Davey (1988) mengemukakan beberapa kriteria yang harus dipenuhi dari penerimaan suatu daerah adalah sebagai berikut :

a. Kecukupan dan Elastisitas

Sumber pendapatan daerah harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang dikeluarkan. Jika suatu sumber penerimaan seperti retribusi hanya menghasilkan persentase yang kecil diatas anggaran yang dikeluarkannya, akan banyak menimbulkan kerugian yaitu ongkos pungutan yang menjadi besar, upaya administrasi terbagi-bagi, pembebanan sulit dicapai secara adil dan kesan yang negative terhadap kemampuan keuangan akan timbul.

b. Pemerataan

Suatu sumber penerimaan seharusnya ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan konsep keadilan.

c. Kelayakan Administrasi

Suatu sumber penerimaan haruslah didukung dengan administrasi yang memadai yang akan memberikan kemudahan didalam melakukan perhitungan, pengawasan dan pelayanan pungutan.

2.1.3 Sumber Pembiayaan Daerah

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 79 tertulis bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari, yaitu

a. Pendapatan Asli Daerah meliputi :

1. Hasil Pajak Daerah

2. Hasil Retribusi Daerah
 3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan meliputi :
1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan, dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam;
 2. Dana Alokasi Umum;
 3. Dana Alokasi Khusus;
- c. Pinjaman Daerah meliputi :
1. Pinjaman Dalam Negeri;
 2. Pinjaman Luar Negeri;
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar sangat ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal pengelolaannya. Dimana faktor tersebut adalah :

a. Faktor Internal :

Faktor Internal dalam pengelolaan PAD meliputi :

1. Pendataan /Identifikasi.

Identifikasi dapat dilakukan oleh Pemda (Dipenda/BPKD) dengan jalan melakukan pengecekan secara langsung ke lapangan terhadap objek dan subjek pajak/retribusi. Kegiatan ini perlu melibatkan beberapa dinas/instansi terkait, misalnya dinas pariwisata, dinas tata kota, dekooperindag dan dinas lainnya. Kerjasama itu dapat saja dibawah koordinasi Wakil Walikota/Sekda.

2. Penaksiran Pajak

i. Menghitung pajak sendiri (*self assesment*)

ii. Penaksiran oleh petugas pajak (*official assesment*)

3. Penetapan Target Harus Didasarkan Pada :

Potensi yang ada. Bila tidak maka target yang ditetapkan mungkin saja jauh lebih rendah dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Meskipun realisasi penerimaan melebihi dari target atau di atas 100 %, namun masih jauh lebih rendah dari potensi yang ada.

4. Penetapan Tarif.

Tarif ditetapkan berdasarkan Perda dan mengacu pada UU pajak dan retribusi daerah (UU No 34 tahun 2000). Perubahan tarif paling lama (*broadening tax rate*) antara (3 – 5) tahun. Penetapan tarif tidak harus terlalu tinggi, tapi harus memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat. Tarif yang tinggi juga dikawatirkan akan menimbulkan (1) ekonomi distorsi (*distortion economics*) (2). Menimbulkan kemungkinan adanya

kolusi antara petugas pajak dengan subjek pajak. (3). Wajib Pajak enggan melunasi kewajibannya.

5. Pemungutan dan Pembayaran

Permasalahan serius yang sering terjadi dalam pemungutan pajak pada beberapa daerah adalah untuk pajak hotel, restoran, reklame, dan pajak hiburan. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat efektifitas penerimaan masing-masing jenis pajak tersebut, meskipun potensi penerimaannya cukup besar.

6. Sistem Pencatatan dan Pelaporan

Sistem pencatatan dan pelaporan dilakukan tiap hari oleh bagian pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga meningkatkan rasa kepercayaan dan kesadaran bagi wajib pajak.

7. Pengawasan

Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk mengurangi tingkat kebocoran dan penyimpangan pengelolaan pendapatan, tetapi diarahkan untuk menciptakan tindakan aparaturnya sehingga menjadi lebih efektif, efisien dan bersih. Dengan adanya pengawasan akan memberikan dorongan dan motivasi yang tinggi bagi petugas lapangan untuk bekerja secara optimal.

8. Pemaksaan dan Penerapan Sanksi

Pemaksaan dan penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku akan dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Sanksi yang efektif dapat dikaitkan dengan kegiatan perbankan.

9. Kemampuan SDM

Kemampuan SDM pengelola pajak/retribusi sangat menentukan peningkatan pendapatan. Karena itu kuantitas dan kualitas pengelola pajak/retribusi yang memadai haruslah diupayakan. Ada dua hal yang perlu dilakukan : (1) menempatkan tenaga yang memiliki latar belakang pendidikan/pelatihan dibidang keuangan daerah. (2) menempatkan tenaga yang memiliki kemauan dan kemampuan serta motivasi yang tinggi untuk meyakinkan para wajib pajak.

b. Faktor Eksternal

1. Adanya Tingkat Kesadaran Masyarakat.

Tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan tercipta bila masyarakat telah memahami fungsi dan peranan dari pajak/retribusi yang mereka bayarkan. Karena itu setiap ada Peraturan Daerah Pajak maupun perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi perlu disosialisasikan kepada masyarakat.

2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bila PDRB cukup tinggi maka penerimaan pajak seharusnya juga tinggi. Artinya ada respon yang positif dari kenaikan PDRB terhadap peningkatan penerimaan pajak. Tetapi bila sebaliknya maka berarti ada permasalahan dalam pengelolaannya.

3. Perkembangan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup baik akan membawa dampak positif terhadap peningkatan pendapatan di daerah, sebab pertumbuhan

ekonomi nasional tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan PAD.

2.1.4.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000, obyek pajak daerah untuk daerah propinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Sedangkan pajak daerah untuk daerah kabupaten/kotamadya meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak penggalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

2.1.4.2 Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut Sutrisno P.H.(1986), adalah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa dan barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk. Sedangkan menurut J.B Kristiadi (1985) retribusi merupakan pungutan langsung yang dikenakan untuk pelayanan tertentu dari pemerintah.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, disebutkan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah adalah kemampuan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Restribusi daerah digolongkan menjadi tiga golongan yaitu : retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

2.1.4.2.1 Ciri-ciri Retribusi Daerah

Ciri-ciri yang terdapat dalam retribusi daerah menurut Musgrave (1990) adalah sebagai berikut :

- a. Retribusi dikenakan pada siapa saja menggunakan jasa yang diberikan oleh daerah.
- b. Adanya balas jasa yang langsung dapat diterima oleh si pembayar retribusi.
- c. Bagi yang telah menikmati jasa atau tidak membayar retribusi dapat dikenakan sanksi atau upaya memaksa.
- d. Retribusi dipungut oleh Daerah berdasarkan UU dan peraturan pelaksanaanya

Menurut Josef Riwu Kaho (1988) ada ciri-ciri mendasar dari retribusi, yaitu sebagai berikut :

- a. Retribusi dipungut oleh Negara
- b. Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis

- c. Ada kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
- d. Retribusi dikenakan pada setiap orang yang mempergunakan jasa-jasa yang disediakan Negara.

2.1.4.2.2 Dasar-dasar Pemungutan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan retribusi daerah, yaitu :

- a. UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. UU No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- d. UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.1.4.2.3 Alasan Pengenaan Retribusi Daerah

Pungutan retribusi langsung atas konsumen biasanya dikenakan karena satu atau lebih pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Davey, 1988) :

- a. Apakah pelayanan tersebut merupakan barang-barang umum atau pribadi, mungkin pelayanan tersebut dapat disediakan pada setiap orang, dan oleh karena itu tidak wajar untuk membebankan biaya-biaya tersebut kepada pembayar-pembayar pajak yang tidak mendapatkan jasa/ barang tersebut.
- b. Suatu jasa dapat melibatkan suatu sumber yang langka atau mahal dan perlunya disiplin konsumsi masyarakat.
- c. Mungkin ada bermacam-macam variasi dalam konsumsi individu, yang berkaitan setidaknya untuk memilih daripada memerlukan.

- d. Jasa-jasa dapat digunakan untuk mencari kegiatan-kegiatan mencari keuntungan disamping memuaskan kebutuhan-kebutuhan individu dalam negeri.
- e. Retribusi dapat menguji arah dan skala dari permintaan masyarakat akan jasa, dimana kebutuhan pokok atau bentuk-bentuk dan standar-standar dari penyediaan tidak dapat dengan tegas ditentukan.

2.1.4.2.4 Faktor-faktor Penentu Tinggi Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi daerah, seperti yang dikemukakan oleh R. Soedargo (1964) adalah sebagai berikut :

a. Faktor Jumlah Subjek Retribusi Daerah

Sesuai dengan sifatnya maka retribusi daerah hanya dikenakan kepada mereka yang telah memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin besar, hal ini dapat dilihat dari perkembangan ekonomi daerah tersebut.

b. Faktor Jenis dan Jumlah Retribusi Daerah

Dengan perkembangan ekonomi yang semakin baik dari suatu daerah akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Semakin banyak jasa pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat akan semakin besar pula pungutan yang ditarik dari warga masyarakatnya.

c. **Faktor Tarif Retribusi Daerah**

Besarnya tarif retribusi daerah yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi daerah yang dikenakan kepada masyarakat tinggi maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

d. **Faktor Efektivitas Pungutan Retribusi Daerah**

Dalam melaksanakan pungutan retribusi daerah, tidak dapat dipisahkan kemampuan aparat pelaksana pungutan, semakin tinggi kemampuan pelaksana pungutan maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan, yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.1.4.2.5 Jenis dan Kriteria Retribusi Daerah

Berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000, retribusi daerah dibagi dalam tiga jenis, yaitu

- a. **Retribusi Jasa Umum**
- b. **Retribusi Jasa Usaha**
- c. **Retribusi Perizinan tertentu**

Kriteria masing-masing jenis retribusi daerah adalah sebagai berikut :

- a. **Retribusi Jasa Umum**
 - 1. **Retribusi Jasa Umum** bersifat bukan pajak dan bersifat bukan jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
 - 2. **Jasa yang bersangkutan** merupakan kewenangan daerah dalam melaksanakan desentralisasi;

3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
 4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi;
 5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional penyelenggaraanya;
 6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial; dan
 7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik
- b. Retribusi Jasa Usaha
1. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
 2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki/dikuasai daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 3. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
 4. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
 5. Biaya penyelenggaraan izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi;
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
3. Biaya penyelenggaraan izin dan biaya untuk menanggulangi dampak negative dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

2.1.4.2.6 Klasifikasi Retribusi Daerah

Permasalahan retribusi atau retribusi daerah lebih tepatnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2001 dimana yang dimaksud dengan retribusi daerah atau retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sedangkan retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi umum seperti yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :

1. Retribusi pelayanan kesehatan
2. Retribusi pelayanan persampahan atau kesehatan
3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

5. Retribusi parkir di tepi jalan umum
6. Retribusi pelayanan pasar
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
8. Retribusi penggantian biaya cetak peta
9. Retribusi pengujian kapal perikanan.

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis retribusi jasa usaha yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :

1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
2. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
3. Retribusi tempat pelelangan
4. Retribusi terminal
5. Retribusi tempat khusus parkir
6. Retribusi tempat penginapan atau pesanggarahan atau vila
7. Retribusi penyedotan kakus
8. Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
9. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
10. Retribusi penyebrangan di atas air
11. Retribusi pengolahan limbah cair
12. Retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau

fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur dalam PP No 66/2001 antara lain :

1. Retribusi izin mendirikan bangunan
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
3. Retribusi izin gangguan
4. Retribusi izin trayek.

Dasar penetapan tarif pemungutan retribusi oleh pemerintah daerah untuk retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu berbeda. Retribusi jasa umum didasarkan pada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sedangkan retribusi perizinan tertentu berdasarkan pada bulan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sifat-sifat retribusi menurut Haritz (1995 : 84) adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada membayar;

3. Iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar;
4. Retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol;
5. Dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah.

2.1.4.2.7 Fungsi Retribusi Daerah

Seperti halnya dengan pajak daerah, retribusi daerah juga mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi sebagai sumber keuangan negara, maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan uang dari rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran yang bersifat rutin maupun untuk pembangunan.
- b. Fungsi mengatur maksudnya adalah bahwa retribusi digunakan sebagai alat untuk mengatur/melaksanakan kebijakan negara dalam laporan sosial dan ekonomi.

2.1.4.3 Retribusi Pasar

2.1.4.3.1 Pengertian Pasar

Menurut ahli ekonomi pasar adalah semua penjual dan pembeli yang melakukan transaksi baik penjualan ataupun pembelian berupa barang/jasa. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik berupa orang atau kumpulan orang yang memiliki keinginan dan kebutuhan serta mempunyai kemampuan untuk membayar guna memenuhi kebutuhannya (Gitosudarmo, 1992:159).

Menurut Bagus Santosa (1995) pasar adalah suatu lahan atau tempat dimana tempat tersebut terjadi jual beli barang dan jasa. Di dalamnya terdapat dua belah pihak, yang satu sebagai pembeli dan yang satu sebagai penjual. Mereka saling memuaskan kebutuhannya dimana suatu barang dan jasa ditawarkan kemudian terjadilah perpindahan hak milik atas barang/jasa dari penjual ke pembeli.

Pasar ditinjau dari kegiatannya dapat dibedakan :

- a. Pasar tradisional adalah pasar yang kegiatan para pedagang dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas;
- b. Pasar modern adalah pasar yang kegiatan para penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dan tidak langsung dalam bentuk eceran/grosir dalam waktu tetap dengan tingkat pelayanan yang lebih luas.

Pasar ditinjau dari jenis dagangannya dibedakan menjadi:

- a. Pasar umum adalah pasar yang jenis dagangannya yang diperjualbelikan lebih dari satu jenis dagangan secara berimbang minimal tersedia pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- b. Pasar hewan adalah pasar yang ditunjuk dan disediakan oleh pemerintah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun kecil.

2.1.4.3.2 Pengertian Retribusi Pasar

Pengertian retribusi pasar dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar sebagai berikut, “Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi bagi setiap orang atau badan yang memperoleh fasilitas pasar.” Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa retribusi pasar merupakan pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada setiap orang/badan yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai kontraprestasi atas segala fasilitas yang diperoleh.

Klasifikasi retribusi pasar menurut Goedhart (1975) adalah sebagai berikut:

1. Menurut sifat prestasi negara, retribusi pasar adalah retribusi untuk pembangunan berbagai bangunan. Pedagang sebagai pembayar retribusi pasar menerima prestasi dari pemerintah daerah berupa penggunaan bangunan pasar maupun fasilitas lain yang disediakan oleh pemerintah.
2. Menurut cara menentukan jumlah pungutan, retribusi pasar, variabel jumlah pungutan tersebut tergantung dari kelas pasar, luas kios, golongan dagang serta tempat berdagang.

3. Menurut cara pembayaran, retribusi pasar termasuk retribusi kontan, pemakai jasa bukan kios menggunakan sistem pembayaran harian atau mingguan.

2.1.4.3.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tinggi rendahnya penerimaan retribusi pasar yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Eksternal

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cukup tinggi maka penerimaan retribusi pasar seharusnya juga tinggi. Artinya ada respon yang positif dari kenaikan PDRB terhadap penerimaan retribusi pasar. Tetapi bila sebaliknya maka berarti ada permasalahan dalam pengelolaannya.

- b. Faktor Internal

1. Jumlah Pedagang

Jumlah pedagang merupakan subjek retribusi yang memanfaatkan fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak pedagang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah yang ada di pasar maka penerimaan retribusi pasar juga semakin besar.

2. Jumlah Toko

Semakin baiknya perkembangan ekonomi di suatu daerah maka akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan jasa pelayanan kepada warganya. Maka semakin banyaknya jumlah toko maka akan semakin besar pula pungutan yang diperoleh.

3. Tarif Retribusi

Besarnya tarif sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar karena jika tarif retribusi pasar tinggi maka penerimaan retribusi akan semakin meningkat.

4. SDM Pengelola

Kemampuan SDM pengelola sangat menentukan peningkatan penerimaan retribusi pasar. Karena kuantitas dan kualitas pengelola retribusi yang memadai haruslah diupayakan, karena dalam pelaksanaan pungutan retribusi pasar tidak dapat dipisahkan kemampuan SDM pengelola, semakin tinggi kemampuan SDM pengelola maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas pungutan, yang pada akhirnya akan menaikkan jumlah penerimaan daerah.

2.1.4.3.4 Jenis-jenis Retribusi Pasar

Adapun Jenis-jenis Retribusi Pasar menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 08 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi Bulanan Pasar yaitu terdiri dari penerimaan sewa toko dan kios,
2. Retribusi Harian Pasar yaitu terdiri dari penerimaan dari meja batu dan pelataran/los,
3. Retribusi Kakus Umum,
4. Retribusi Izin Peralihan Hak Pakai (BBN),
5. Retribusi Izin Penjaminan Hak Pakai (Borg),
6. Izin Peningkatan Kualitas Bangunan,
7. Izin Penempatan Payung,

8. Retribusi Izin Peminjaman Hak Pakai (Kontrak),
9. Langganan Listrik,
10. Royalti eks TLA,
11. Royalti Ps Modern,
12. Royalti Ps Bandar Buat,
13. Perubahan Bentuk dan Peningkatan Kualitas,
14. Pendapatan Denda Ret Bulanan Pasar,
15. Piutang Retribusi Harian Pasar.

2.1.5 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, provinsi maupun kabupaten/kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi ditingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya.

Produk Domestik Regional Bruto adalah alat pengukur pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui maju tidaknya perekonomian suatu daerah. PDRB merupakan nilai barang dan jasa yang diproduksi didalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. PDB hanya mengukur besarnya kegiatan ekonomi masyarakat setiap tahunnya. PDB tidak dapat menunjukkan kesejahteraan situasi sosial, politik dan perdamaian, kesejahteraan sosial, kejahatan dan kekerasan, kerukunan nasional dan seterusnya dari berbagai variabel yang menunjukkan kesejahteraan

masyarakat. Seperti diketahui tidak semua kegiatan ekonomi dilakukan melalui transaksi pasar, sementara PDB hanyalah mencakup transaksi yang dilakukan melalui pasar saja dan tidak memperhitungkan transaksi kegiatan ekonomi yang tidak melalui pasar. Misalnya kegiatan produktif seorang ibu rumah tangga baik mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah tidaklah dimasukkan dalam penghitungan PDRB karena dilakukan diluar transaksi pasar. Namun bila hal-hal tersebut dikerjakan oleh pembantu rumah tangga dari desa yang digaji maka kegiatan tersebut dimasukkan dalam PDB karena dilakukan lewat transaksi pasar dengan pembayaran balas jasa. (Faried Wijaya, 1990).

Perhitungan PDRB dilakukan dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai sektor dalam perekonomian. Nilai tambah disini merupakan nilai penjualan barang akhir dikurangi dengan nilai barang antara atau inputnya. Hal ini akan menghindari perhitungan ganda yaitu adanya pembeli dan penjualan komponen beberapa kali. Beberapa manfaat perhitungan PDRB antara lain adalah (Faried Wijaya, 1990).

- a. Merupakan ukuran tingkat kegiatan ekonomi/tingkat dalam suatu perekonomian hingga diketahui pertumbuhannya.
- b. Merupakan basis/dasar kebijakan ekonomi pemerintah.

Dalam menghitung nilai PDRB untuk setiap sektor tersebut berdasarkan atas harga berlaku dan harga konstan. PDRB atas harga berlaku berarti menghitung nilai tambah faktor produksi berdasarkan atas harga pada tahun yang bersangkutan. Nilai PDRB atas harga berlaku ini menggambarkan perkembangan volume produksi dan perubahan tingkat harga. Harga yang dipakai sebagai dasar

perhitungan merupakan harga yang diterima produsen, sedangkan harga konstan yaitu menilai faktor produksi atas harga pada tahun dasar yaitu harga tahun 1993. Dari nilai konstan ini akan tergambar tingkat produktifitas dan kapasitas produksi untuk setiap lapangan usaha. PDRB atas dasar harga konstan dipakai sebagai dasar penilaian pertumbuhan ekonomi regional.

2.2 Studi Literatur

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar :

1. Sri Teguh Pambudi (1999) meneliti tentang “Analisis Penentuan Tarif Retribusi Pasar (Kasus Pasar Induk Brebes Daerah Kabupaten Brebes)”. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa retribusi pasar di Pasar Induk Brebes merupakan salah satu sumber keuangan daerah di daerah Kabupaten Brebes. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan dari retribusi pasar adalah tarif retribusi pasar yang dikenakan kepada setiap pedagang yang memanfaatkan pasar dan fasilitasnya tersebut. Tarif retribusi pasar di Kabupaten Brebes ditetapkan dengan perda dan cara penentuan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan : 1) kemampuan ekonomi masyarakat, 2) tarif retribusi pasar di daerah lain, 3) tingkat inflasi yang berlaku di daerah. Dengan tarif yang berlaku saat ini, penerimaan retribusi pasar di Pasar Induk Brebes mengalami peningkatan terutama sepuluh tahun terakhir. Retribusi pasar mempunyai peningkatan/pertumbuhan penerimaan sebesar 10,87% rata-rata pertahun yaitu Rp. 320.224.000 tahun 1989/1990 menjadi Rp 810.672.000 pada tahun 1998/1999. Sedangkan penerimaan Retribusi Pasar Induk Brebes

pada tahun 1989/1990 sebesar Rp 56.751.400 menjadi Rp 165.945.710 pada tahun 1998/1999, sehingga pertumbuhannya adalah sebesar 12,66% rata-rata pertahun. Penerimaan tersebut ternyata belum mencukupi seluruh biaya penyelenggaraan pasar di Pasar Induk Brebes, yang terdiri dari : 1) biaya operasional, 2) biaya pemeliharaan dan 3) biaya konstruksi/investasi, dimana lima tahun terakhir yaitu dari tahun 1994/1995-1998/1999 biaya tersebut tertutupi dari penerimaannya sebesar 55,92% rata-rata per tahun. Hal ini terjadi antara lain karena tarif retribusi pasar ditetapkan berdasarkan Perda Dati II Kabupaten Brebes No. 14 Tahun 1992 tentang Perubahan Kedua Perda No.14 Tahun 1981 Tentang Pengelolaan dan Pembangunan/Pemungaran Pasar, Perpasaran dan Fasilitas Perpasaran lainnya, yang berlaku saat ini tarif retribusi pasar terlalu rendah.

2. Bambang Sumardana (2001) dengan penelitian yang berjudul Faktor Penentu Penerimaan Retribusi Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan menggunakan data sekunder time series menyimpulkan bahwa: Dengan menggunakan uji t (uji partial) dengan taraf signifikansi 5%, variabel jumlah petugas penarik retribusi dan PDRB mempunyai pengaruh yang signifikan atau nyata terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar, sedangkan variabel jumlah penduduk Kota Surakarta tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar di Kota Surakarta. Dengan menggunakan uji f dengan taraf signifikansi 5% ternyata faktor jumlah pedagang pasar, jumlah penduduk, jumlah petugas penarik retribusi dan PDRB secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan/nyata terhadap jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar di Kota Surakarta. Berdasarkan

hasil pengolahan data diketahui bahwa koefisien determinasi sebesar 0,788 atau 78%. Angka ini menunjukkan bahwa variasi perubahan variabel independen yaitu variabel jumlah penerimaan retribusi pengelolaan pasar sebesar 78,8% dijelaskan oleh perubahan variabel independen yaitu jumlah pedagang pasar, jumlah penduduk, jumlah petugas penarik retribusi dan PDRB, sedangkan untuk sisanya ($100\% - 78,8\%$) 21,2% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

3. Tatik Yuliningsih (2002) meneliti tentang “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Purbalingga”. Penelitian ini menggunakan analisis efektifitas dan elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB. Perhitungan potensi pada perhitungan efektifitas yang digunakan adalah kios, los dan halaman/peralatan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Penerimaan retribusi pasar Kabupaten Purbalingga selama tahun anggaran 1997/1998-1999/2000 (sebelum otonomi daerah) belum efektif. Ini terlihat rata-rata efektifitas pemungutan retribusi pasar yaitu sebesar 45,73% tiap tahunnya. Angka tersebut relative rendah karena masih dibawah 60% dari seluruh potensi retribusi pasar. Setelah diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000, efektifitasnya menjadi 48,19%. Kemudian tahun 2001 meningkat tajam menjadi sebesar 76,39%, yang berarti pada tahun 2001 penerimaan retribusi pasar sudah efektifitas.
- b. Elastisitas penerimaan retribusi pasar terhadap PDRB menunjukkan hubungan yang elastis yaitu rata-rata sebesar 2,02% pertahun selama kurun waktu 1997/1998-2001. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan 1%

dari PDRB akan menyebabkan kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar 2,02% .

4. Putranto (2007) dalam penelitiannya yang berjudul “Retribusi Pelayanan Pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang” dapat disimpulkan, Realisasi perolehan pungutan retribusi pelayanan pasar di Peterongan berbeda secara signifikan dibandingkan perolehan di Pasar Banget Ayu. Rata-rata persentase perolehan retribusi tahun 2003 – 2005 di Peterongan sebesar 101,92% sedangkan di Banget Ayu sebesar 99,27%. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di Pasar Peterongan dilakukan dengan lebih baik dibandingkan dengan Pasar Banget Ayu. Hal ini dapat dilihat dari kesesuaian jadwal pemungutan, kesesuaian perolehan target dengan realisasi perolehan retribusi, serta ketercakupan seluruh objek retribusi yang dipungut. Namun ada beberapa kendala yang masih dihadapi oleh Pasar Peterongan dan Pasar Banget Ayu adalah kurang seimbangnya jumlah petugas dengan jumlah pedagang, masih terjadi kebocoran pelaporan pemasukan retribusi oleh petugas pemungut, serta adanya keengganan pedagang untuk membayar dengan alasan fasilitas pasar yang kurang baik. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah pemungutan retribusi adalah dengan memperbaiki fasilitas pasar, serta memberi sanksi tegas kepada petugas yang curang dalam melaporkan pendapatan retribusi.
5. Setyaningsih (2009) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Surakarta” dapat disimpulkan bahwa, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Surakarta pada tahun anggaran 2003-2007 mengalami penurunan tiap tahun. Hal ini

disebabkan Dinas Pengelolaan Pasar setiap tahunnya minimal membangun empat pasar. Pada tahun 2004, realisasi penerimaan retribusi pasar di Surakarta tidak dapat mencapai targetnya karena pemerintah membangun satu pasar yaitu pasar Nusukan, sehingga pemasukan berkurang karena pengalihan pasar sementara tanpa adanya pemungutan retribusi. Begitu juga yang terjadi pada tahun anggaran 2007, yang membangun 3 pasar yaitu pasar Kembang, pasar Sidodadi, dan pasar Jongke. Tingkat pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar bervariasi tiap tahun anggaran. Tingkat pertumbuhan terendah sebesar -2,40% pada tahun 2004 dan tertinggi sebesar 22,66% pada tahun 2005. Rata-rata pertumbuhan tiap tahun selama tahun 2003 sampai dengan 2007 sebesar 8,24% /tahun. Efektifitas paling baik terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar 106,81% dari target yang telah ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta. Pada tahun 2004 dan 2007 tidak efektif karena kurang dari yang ditargetkan. Tetapi apabila tingkat realisasi dengan target penerimaan retribusi pasar di Surakarta dirata-rata selama lima tahun anggaran telah efektif.

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap suatu masalah yang kebenarannya dapat diuji kembali. Dimana tingkat kebenaran perlu dibuktikan dan diuji secara empiris. Berdasarkan permasalahan diatas maka hipotesa yang dapat diberikan adalah :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh positif terhadap penerimaan Retribusi Pasar

2. Jumlah Toko berpengaruh positif terhadap penerimaan Retribusi Pasar
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah toko secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap penerimaan Retribusi Pasar.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Adapun lokasi penelitian yang diangkat penulis adalah di Kota Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder menurut runtun waktu (*time series*) dalam bentuk tahunan dari tahun 1995-2009. Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Besarnya Retribusi Pasar pemerintah daerah Kota Padang
2. Besarnya PDRB pemerintah daerah Kota Padang
3. Jumlah Toko di Pasar Kota Padang

Data yang diperoleh dari Dinas Pasar untuk data Retribusi Pasar dan Jumlah Toko, dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data PDRB. Selain itu, penulis juga memperoleh data dari browsing di internet, buku-buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan judul ini.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah Retribusi Pasar. Sedangkan variabel independen terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Toko.

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut:

1. Variabel Dependen yaitu Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada setiap orang/badan yang memanfaatkan fasilitas pasar sebagai kontraprestasi atas segala fasilitas yang diperoleh di pasar Kota Padang selama periode 1995-2009.
2. Variabel Independen
 - a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB atas harga berlaku berarti menghitung nilai tambah faktor produksi berdasarkan atas harga pada tahun yang bersangkutan. Alasan penggunaan PDRB harga berlaku karena Nilai PDRB atas harga berlaku mengukur kenaikan pertumbuhan ekonomi dengan menggambarkan perkembangan volume produksi dan perubahan tingkat harga. Harga yang dipakai sebagai dasar perhitungan merupakan harga yang diterima produsen. Sedangkan PDRB Harga konstan mengukur pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan sektoral tanpa dipengaruhi oleh harga yang mana akan tergambar pada tingkat produktifitas dan kapasitas produksi untuk setiap lapangan usaha. PDRB harga konstan dipakai sebagai dasar penilaian pertumbuhan ekonomi regional.
 - b. Jumlah Toko adalah total toko, kios dan los yang ada didalam pasar Kota Padang selama periode 1995-2009

3.4 Metode Penelitian

3.4.1 Metode Kuantitatif

Metode Kuantitatif adalah pendekatan ilmiah terhadap pengambilan keputusan manajerial dan ekonomi. Pemrosesan dan manipulasi data mentah menjadi informasi yang bermanfaat, inilah yang merupakan jantung dari analisis kuantitatif (Kuncoro:2001)

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 1995-2009. Alat analisis ini menggunakan persamaan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independent (variabel yang menjelaskan) terhadap variabel dependent (variabel yang dijelaskan)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Pembentukan Model

Menurut Mudrajat Kuncoro (2001) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk mempengaruhi penerimaan Retribusi Pasar. Meskipun secara teori ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Retribusi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, Sumber Daya Manusia, dan Kebijakan. Berdasarkan model yang dikembangkan oleh Mudrajat, namun penelitian ini mengestimasi analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar di Kota Padang. Dimana faktor tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah toko, dengan demikian dapat dituliskan fungsinya sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2)$$

$$\text{Retribusi Pasar} = f(\text{PDRB}, \text{Jumlah Toko})$$

Untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dilakukan analisis regresi linear berganda dan untuk mengestimasiya yaitu dengan menggunakan kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares*). Metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Squares*) dikemukakan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika bangsa Jerman (Gujarati, 1995). Secara umum bentuk persamaan yang dikemukakan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + U_i$$

Dengan memperhatikan persamaan diatas dan menganggap $\beta = b$, maka persamaan diatas dapat diubah menjadi :

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + U$$

Melihat persamaan diatas, maka persamaan dirubah dalam bentuk *Double Log Transformation*, dengan memakai metode *Ordinary Least Squares*. *Double Log Transformation* dipakai untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independent dalam bentuk persentase terhadap variabel dependen, maka persamaannya dijadikan dalam bentuk log. Sehingga persamaan diatas dapat dirubah menjadi (Gujarati, 1995) :

$$\text{Log } Y = b_0 + b_1 \log X_1 + b_2 \log X_2 + U$$

Dimana :

Y	= Penerimaan Retribusi Pasar
X ₁	= PDRB
X ₂	= Jumlah Toko
b ₀	= Konstanta

b_1, b_2 = Koefisien Regresi
 U = Variabel pengganggu

3.5.2 Pengujian Model

3.5.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Kuncoro, 2001:101). Tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh besarnya Koefisien Determinasi (R^2) yang besarnya adalah nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila Koefisien Determinasi (R^2) sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai tersebut semakin mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.5.2.2 Pengujian t-Tes

Uji t-test pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya, apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen. Hipotesis alternatifnya (H_a), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau :

$$H_a : b_i \neq 0$$

Artinya, variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel independen (Kuncoro:2001:97)

Cara pengujian uji t-tes adalah dengan membandingkan t-tabel dengan t-hitung, dimana jika nilai t-hitung yang diperoleh lebih besar dari pada t-tabel, maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat adalah signifikan. Dan sebaliknya, apakah t-hitung yang diperoleh lebih kecil dari t-tabel berarti hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat adalah tidak signifikan. Rumus yang digunakan untuk uji (t-tes) adalah :

$$t = \frac{\beta_i}{S \beta_i}$$

Dimana :

t = Nilai mutlak pengujian (t-hitung)

β_i = Koefisien regresi

$S \beta_i$ = Standar deviasi β_i

3.5.2.3 Pengujian F-Tes

Pengujian F-Tes ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_a), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau :

$$H_0 : b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2001:99)

Cara pengujian uji F-tes adalah dengan membandingkan F-hitung dengan F-tabel dimana jika F-hitung lebih besar dari pada F-tabel, maka berarti secara keseluruhan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya, jika F-hitung yang diperoleh lebih kecil dari F-tabel berarti pengaruh dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. Rumus yang digunakan untuk F-tes adalah :

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

Dimana :

R^2 = Koefisien penentuan berganda

k = Jumlah koefisien variable independen

n = Jumlah observasi

$k-1$ = V1 (degree of freedom numerator)

$n-k$ = V2 (degree of freedom denominator)

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Padang

Kota Padang adalah ibu kota Propinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dan berada antara $0^{\circ} 44' 00''$ dan $1^{\circ} 08' 35''$ Lintang Selatan serta antara $100^{\circ} 05' 05''$ dan $100^{\circ} 34' 09''$ Bujur Timur. Menurut PP No. 17 Tahun 1980, luas Kota Padang adalah $694,96 \text{ km}^2$ atau setara dengan 1,65 persen dari luas Propinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan dengan kecamatan terluas adalah Kota Tengah yang mencapai $232,25 \text{ km}^2$.

Dari keseluruhan luas kota Padang sebagian besar atau 51,01 persen berupa hutan yang dilindungi oleh pemerintah berupa bangunan dan pekarangan seluas $51,08 \text{ km}^2$ atau 7,35 persen. Selain daratan pulau Sumatera. Kota padang memiliki 19 pulau dimana yang terbesar adalah Pulau Bintangur seluas 56,78 ha, kemudian Pulau Sikuai di Kecamatan Bungus Teluk Kabung seluas 48,12 ha dan Pulau Toran di Kecamatan Padang Selatan seluas 33,67 ha.

Ketinggian wilayah daratan Kota Padang sangat bervariasi, yaitu antara 0-1853 m diatas permukaan laut dengan daerah tertinggi adalah Kecamatan Lubuk Kilangan. Kota Padang memiliki banyak sungai yaitu 5 sungai besar dan 16 sungai kecil, dengan sungai terpanjang yaitu Batang Kandis sepanjang 20 km. Tingkat curah hujan Kota Padang mencapai rata-rata 302,35 mm per bulan dengan rata-rata hari hujan 17 hari per bulan pada tahun 2009. Suhu udaranya cukup tinggi yaitu antara $21,6^{\circ} - 31,7^{\circ}$. kelembabannya berkisar antara 78-85 persen.

4.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang

Dilihat dari perkembangan penduduknya maka Kota Padang mengalami perkembangan penduduk yang cukup pesat, yang mana jumlah penduduk Kota Padang dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Peningkatan yang pesat terjadi pada tahun 2002-2003 yaitu sebesar 31.029 jiwa dengan laju pertumbuhannya sebesar 4,22%. Pertambahan penduduk yang cukup pesat tersebut salah satunya dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, sebagai dampak dari pesatnya pembangunan di Kota Padang, sehingga tersedia sarana dan fasilitas yang memadai. Disamping itu jika dilihat dari jumlah penduduk menurut kecamatan, penduduk terbanyak berasal dari Kecamatan Koto Tengah yaitu sebanyak 166.033 jiwa dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Lubuk Kilangan yaitu sebanyak 44.552 jiwa

Tabel 4.1
Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Padang
Tahun 2000-2009

Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Pertumbuhan %
	Laki-laki	Perempuan		
2000	351.570	361.672	713.242	-
2001	357.912	362.871	720.783	1,06
2002	357.487	376.934	734.421	1,89
2003	380.040	385.410	765.450	4,22
2004	385.460	399.280	784.740	2,52
2005	395.711	405.633	801.344	2,12
2006	410.580	409.160	819.740	2,29
2007	416.942	421.248	838.190	2,25
2008	423.039	433.776	856.815	2,22
2009	432.515	443.235	875.750	2,21

Sumber: BPS, Padang Dalam Angka (data diolah)

4.3 Gambaran Umum Pasar Kota Padang

Kota Padang memiliki Sembilan pasar, yang mana terdiri dari Pasar Raya, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Bandar Buat, Pasar Tanah Kongsu, Pasar Ulak Karang, Pasar Simpang Haru, Pasar Inpres Alai, Pasar Inpres Siteba dan Eks TLA Andalas.

Ada beberapa golongan pada Pasar Raya, Pasar Lubuk Buaya dan Pasar Bandar Buat yaitu:

c. Pasar Raya terdiri dari

1. Toko Bertingkat Fase I,
2. Toko Bertingkat Fase II,
3. Toko Bertingkat Fase III,
4. Toko Bertingkat Fase IV,
5. Toko Bertingkat Fase V,
6. Toko Bertingkat Fase VI,
7. Toko Bertingkat Fase VII,
8. Pasar Raya Bertingkat Tahap I,
9. Pasar Raya Bertingkat Tahap II,
10. Pasar Raya Bertingkat Tahap III,
11. Lapangan Pasar Raya Barat,
12. Pertokoan Blok "A",
13. Pertokoan Rajawali,
14. Aton Shopping centre,
15. Inpres Pasar Timur Tahap I,
16. Inpres Pasar Timur Tahap II,

17. Inpres Pasar Timur Tahap III,
 18. Inpres Pasar Timur Tahap IV,
 19. Pertokoan Balai Baru.
- d. Pada Pasar Lubuk Buaya terdiri dari :
1. Pasar Lubuk Buaya Tahap I,
 2. Pasar Lubuk Buaya Tahap II,
- c. Pasar Bandar Buat terdiri dari :
1. Pasar Bandar Buat Tahap I
 2. Pasar Bandar Buat Tahap II.

Dari sembilan pasar tersebut sampai sekarang semuanya masih beroperasi, namun ada beberapa golongan pasar yang tidak dapat beroperasi lagi akibat gempa yaitu Pasar Raya diantaranya :

- b. Inpres Pasar Timur Tahap I,
- c. Inpres Pasar Timur Tahap II,
- d. Inpres Pasar Timur Tahap III,
- e. Inpres Pasar Timur Tahap IV,
- f. Pertokoan Balai Baru.

4.3.1 Fasilitas Pasar

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2002 pasal 1 (Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar), retribusi pasar selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar dan atau pemberian izin tertentu oleh Kepala Daerah terhadap pengelolaan pasar. Adapun pengertian fasilitas pasar adalah sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah

untuk kegiatan perdagangan dan jasa berupa toko, kios, pelataran, meja batu berikut pelayanan keamanan dan kebersihan. Fasilitas pasar yang disediakan oleh pemerintah dalam Perda Kota Padang No 08 tahun 2002 antara lain:

1. Toko adalah bangunan permanen yang secara keseluruhannya terbuat beton, dengan luas maksimal 100m^2
2. Kios merupakan bangunan semi permanen yang sebahagian dibuat dari kayu dan beton, dengan ukuran luas maksimal 30 m^2 .
3. Los adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya.
4. Ruang Lepas adalah ruang yang berada dalam bangunan pasar yang luasnya besar atau sama dengan 100 m^2
5. Pelataran adalah Lokasi tertentu dalam pasar yang ditetapkan sebagai tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang sifatnya tidak permanen.
6. Meja batu adalah bangunan semi permanen yang pakai atap tanpa dinding pembatas antara satu petak dengan petak lainnya dengan menyediakan / dibuatkan meja batu permanen.
7. Kakus adalah bangunan untuk umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam Lokasi Pasar untuk buang air besar, kecil dan atau menyediakan tempat berwudhu.
8. Payung adalah sarana / fasilitas yang digunakan untuk tempat berjualan dalam lokasi Pelataran
9. Listrik adalah listrik yang dikelola dan didistribusikan kepada pedagang oleh Dinas Pasar Kota Padang

10. Toko kelas A lantai I Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai I yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III
11. Toko kelas B lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai I yang terletak pada gang utama
12. Toko kelas C lantai I Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai I yang terletak pada bagian dalam dan belakang
13. Toko kelas A lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko pada lantai II yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III
14. Toko kelas B lantai II Pasar Raya adalah semua petak toko yang terletak pada gang.
15. Toko kelas D lantai III Pasar Raya adalah semua petak toko yang terletak di lantai III.
16. Kios kelas A pada Inpres Pasar Raya adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III.
17. Kios kelas B pada Inpres Pasar Raya adalah semua petak kios pada lantai I yang terletak pada gang.
18. Kios kelas A pada Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap jalan kelas I, II, dan III.
19. Kios kelas B pada Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap ke bagian dalam dan belakang.
20. Kios kelas A Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap jalan kelas I, II, dan III.
21. Kios kelas B Pasar Pembantu adalah semua petak kios pada lantai I yang menghadap bagian dalam dan belakang.

22. Kios kelas A lantai II Pasar Pembantu dan Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios yang menghadap ke jalan kelas I, II, dan III.
23. Kios kelas B lantai II Pasar Pembantu dan Inpres Pasar Pembantu adalah semua petak kios yang menghadap ke bagian dalam dan belakang.

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang menikmati/ memanfaatkan fasilitas pasar dan atau memperoleh izin tertentu dari Kepala Daerah (Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Padang No 08 Tahun 2002). Obyek retribusi adalah seluruh fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan atau kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap pasar (Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Padang No 08 Tahun 2002).

Dalam penggunaan fasilitas pasar, Subjek Retribusi diberikan Kartu Hak Pakai / Kartu Kuning yang merupakan surat tanda bukti sebagai pemegang hak pakai yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu juga ada surat perjanjian yang merupakan surat perjanjian pemakaian fasilitas pasar antara pemegang hak pakai dengan Pemerintah Daerah yang berisikan beberapa ketentuan, persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi (Peraturan Daerah Kota Padang No 08 Tahun 2002). Setiap orang atau badan yang memakai/ memanfaatkan fasilitas pasar yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

4.3.2 Tarif Retribusi Pasar

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang No 08 Tahun 2002, Bab VI pasal 17 ayat (4) berbunyi besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Pemakaian Fasilitas Pasar

1. Pasar Raya :

a) Lantai I :

- 1) Kelas A sebesar Rp 4.000,-/M²/Bulan
- 2) Kelas B sebesar Rp 3.500,-/M²/Bulan
- 3) Kelas C sebesar Rp 2.750,-/M²/Bulan

b) Lantai II :

- 1) Kelas A sebesar Rp 1.600,-/M²/Bulan
- 2) Kelas B sebesar Rp 1.500,-/M²/Bulan
- 3) Ruang lepas sebesar Rp 3.000,-/M²/Bulan

c) Lantai III

- 1) Kelas D sebesar Rp 250,-/M²/Bulan
 - 2) Ruang lepas sebesar Rp 1.750,-/M²/Bulan
- d) Meja batu dan peralatan/los sebesar Rp 1.000,-/Hari/petak ukuran 1 x 1,5M²

2. Inpres Pasar Raya :

- a) Kelas A sebesar Rp 4.750,-/M²/Bulan
- b) Kelas B sebesar Rp 4.500,-/M²/Bulan

3. Pasar Pembantu :

- a) Kelas A sebesar Rp 2.250,-/M²/Bulan
- b) Kelas B sebesar Rp 2.000,-/M²/Bulan

4. Inpres Pasar Pembantu

a) Lubuk Buaya

1) Kelas A sebesar Rp 2.500,-/M²/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp 2.250,-/M²/Bulan

b) Siteba

1) Kelas A sebesar Rp 2.000,-/M²/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp 1.750,-/M²/Bulan

c) Alai

1) Kelas A sebesar Rp 3.000,-/M²/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp 2.750,-/M²/Bulan

d) Bandar Buat

1) Kelas A sebesar Rp 2.750,-/M²/Bulan

2) Kelas B sebesar Rp 2.500,-/M²/Bulan

e) Meja Batu dan peralatan/los sebesar Rp 1.000,-/Hari/petak ukuran 1 x 1,5M²

5. Kakus

a) Buang air besar sebesar Rp 500,-/Orang

b) Buang air kecil sebesar Rp 300,-/Orang

b. Pemberian Izin tertentu

1. Untuk izin penempatan payung sebesar 2% x nilai asset perbulan;

2. Untuk izin peralihan hak sebesar 2% x nilai jual hak pakai (nilai jual ditetapkan dengan SK, Walikota);

3. Untuk izin peminjaman hak sebesar 5% x nilai kontrak per tahun;

4. Untuk izin penjaminan hak sebesar 1,5% x jumlah kredit yang diperoleh;

5. Untuk izin peningkatan kualitas bangunan $0,5\% \times \text{nilai jual hak pakai}$.

4.4 SDM Pengelola

Menurut Notoatmodjo (1992) mengemukakan bahwa berbicara masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek, yaitu menyangkut kuantitas dan kualitas, kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia juga menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik (kualitas fisik), dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan-keterampilan lain. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat diarahkan kepada dua aspek tersebut. Upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia pada kedua aspek tersebut inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan sumber daya manusia.

Dalam upaya peningkatan retribusi pasar diperlukan prasyarat, diantaranya pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Penyiapan sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus agar pengembangan kelembagaan tersebut dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pasar. Pengembangan kelembagaan dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pengelolaan pasar.

Tabel 4.2
SDM Pengelola Retribusi Pasar di Kota Padang
Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2010

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak Tamat SMA	59	42.75
2	Tamat SMA	43	31.16
3	Tamat D3	1	0.72
4	Tamat S1 dan S2	35	25.36
Jumlah		138	100.00

Sumber : Dinas Pasar Kota Padang (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 dapat terlihat bahwa jumlah SDM Pengelola di Dinas Pasar tercatat sebanyak 138 orang, dimana pendidikan tidak tamat SMA merupakan jumlah SDM pengelola yang memiliki kontribusi terbesar (mayoritas) terhadap pengelolaan retribusi pasar di Kota Padang yakni tercatat sebanyak 59 orang dengan persentasenya sebesar 42,75%. Selanjutnya untuk tingkat pendidikan tamat SMA merupakan tingkat pendidikan tertinggi kedua setelah tingkat pendidikan tamat SMA yang tercatat sebanyak 43 orang dengan tingkat persentase nya sebesar 31,16%. Namun, apabila dibandingkan dengan tingkat pendidikan S1, dan S2 hanya berjumlah 36 orang, dan tingkat pendidikan D3 memiliki persentase paling rendah yang tercatat sebesar 0,72% dengan jumlah 1 orang.

Hal ini berarti SDM pengelola masih kurang efektif dan efisien. Sehingga perlu upaya dari Pemerintah Daerah Kota Padang untuk meningkatkan kinerja atau manajemen pengelolaannya dalam upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas SDM Pengelola retribusi pasar di Kota Padang. Selanjutnya mengingat pendidikan dan pengetahuan SDM yang relative rendah, terutama tenaga pemungut, maka diperlukan pelatihan (training) yang terkait dengan pengelolaan

keuangan daerah khususnya pengelolaan retribusi pasar sehingga mampu meningkatkan kualitas SDM pengelola dalam upaya peningkatan penerimaan retribusi pasar.

4.5 Perkembangan Penerimaan Retribusi Pasar

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Penerimaan Retribusi Pasar adalah penerimaan yang terdiri dari retribusi bulanan pasar, retribusi harian pasar dan penerimaan lain-lain. Penerimaan lain-lain terdiri dari Retribusi Kakus Umum, Retribusi Izin Peralihan Hak Pakai (BBN), Retribusi Izin Penjaminan Hak Pakai (Borg), Izin Peningkatan Kualitas Bangunan, Izin Penempatan Payung, Retribusi Izin Peminjaman Hak Pakai (Kontrak), Langganan Listrik, Royalti eks TLA, Royalti Ps Modern, Royalti Ps Bandar Buat, Perubahan Bentuk dan Peningkatan Kualitas, Pendapatan Denda Ret Bulanan Pasar, Piutang Retribusi Harian Pasar. Perkembangan penerimaan Retribusi Pasar dari tahun 1995-2009 dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.3
Perkembangan dan Pertumbuhan Retribusi Pasar Kota Padang
Perkompenen Tahun 1995-2009
(Dalam Ribuan)

Tahun	Jenis Penerimaan					
	Retribusi Bulanan Pasar	Pertumbuhan	Retribusi Harian Pasar	Pertumbuhan	Penerimaan Lain-lain	Pertumbuhan
1995	906,884	-	714,618	-	427,265	-
1996	973,689	7,37	780,406	9,21	462,059	8,14
1997	981,322	0,78	789,519	1,17	472,127	2,18
1998	1,009,875	2,91	893,472	13,17	746,918	58,20
1999	1,312,479	29,96	997,496	11,64	965,800	29,30
2000	1,337,826	1,93	1,004,853	0,74	1,106,891	14,61
2001	1,389,717	3,88	1,006,935	0,21	1,178,943	6,51
2002	1,438,560	3,51	1,027,771	2,07	1,255,087	6,46
2003	1,740,873	21,01	1,044,100	1,59	2,423,807	93,12
2004	1,807,626	3,83	1,221,197	16,96	2,412,749	-0,46
2005	1,884,042	4,23	1,264,739	3,57	2,411,367	-0,06
2006	1,931,386	2,51	1,270,377	0,44	2,552,331	5,85
2007	1,993,723	3,23	1,305,462	2,76	2,472,706	-3,12
2008	1,985,786	-0,39	1,667,864	27,76	2,173,262	-12,11
2009	1,483,618	-25,28	1,959,043	17,46	2,342,302	7,78
Rata-rata		4,25		12,08		24,04

Sumber: Dinas Pasar Kota Padang (Data diolah)

Dari tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang Tahun 1995-2009 secara umum mengalami peningkatan setiap tahun dengan tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi. Penerimaan retribusi pasar meningkat sangat tajam yaitu sebesar Rp. 3,721,418,000,- menjadi Rp. 5,208,780,000,- yang merupakan pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 39,97% pada tahun 2003. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penerimaan lain-lain yaitu Izin Peningkatan Kualitas Bangunan. Sementara itu pertumbuhan paling rendah yaitu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan minus yaitu sebesar 0,72%. Penurunan ini disebabkan oleh penerimaan retribusi bulanan pasar akibat terjadi gempa 30 September 2009, yang mengakibatkan beberapa bangunan pasar hancur sehingga penerimaan retribusi pasar tidak optimal pada penerimaan retribusi bulanan pasar yang pertumbuhannya menurun sebesar 8,43%. Untuk penerimaan bulanan pasar

rata-rata pertumbuhan penerimaannya sebesar 4,25% pertahun. Pada penerimaan harian pasar rata-rata pertumbuhan penerimaannya sebesar 12,08% pertahun, sedangkan pertumbuhan penerimaan paling tinggi yaitu pada penerimaan lain-lain yaitu sebesar 24,04 % pertahun.

Tabel 4.4
Perkembangan Kontribusi pos-pos penerimaan Retribusi Pasar
Terhadap Total Retribusi Pasar Kota Padang (%)
Tahun 1995-2009

Tahun	Retribusi Bulanan Pasar	Retribusi Harian Pasar	Penerimaan Lain-lain	Jumlah
1995	44.26	34.88	20.85	100
1996	43.94	35.21	20.85	100
1997	43.75	35.20	21.05	100
1998	38.10	33.71	28.18	100
1999	40.07	30.45	29.48	100
2000	38.78	29.13	32.09	100
2001	38.87	28.16	32.97	100
2002	38.66	27.62	33.73	100
2003	33.42	20.05	46.53	100
2004	33.22	22.44	44.34	100
2005	33.88	22.75	43.37	100
2006	33.57	22.08	44.36	100
2007	34.54	22.62	42.84	100
2008	34.08	28.62	37.30	100
2009	25.65	33.86	40,49	100
Rata-rata	36.99	28.45	34.56	100

Sumber : Dinas Pasar Kota Padang (Data Diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat Penerimaan retribusi pasar Kota Padang menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Dilihat dari retribusi bulanan pasar selama 15 tahun pengamatan terlihat bahwa kontribusinya meningkat berfluktuasi dengan rentang antara 25% hingga 44%. Kontribusi tertinggi dicapai tahun 1995 yaitu sebesar 44,26% namun angka ini menurun pada tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan tidak terdapat lonjakan yang berarti dari perkembangannya hanya saja pada tahun 2009 mengalami penurunan yaitu sebesar 8,43% dari tahun

sebelumnya. Dari tabel diatas juga dapat dilihat bahwa penerimaan retribusi bulanan pasar memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Retribusi Pasar yaitu dengan rata-rata sebesar 36,99%.

Penerimaan retribusi harian pasar Kota Padang memberikan kontribusi yang cukup berarti dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 28,45%. Penerimaan retribusi harian pasar setiap tahunnya mengalami peningkatan, kontribusi yang paling besar yaitu tahun 2009 sebesar 33,86%.

Selain retribusi bulanan pasar dan retribusi harian pasar masih terdapat beberapa pos penerimaan dalam penerimaan retribusi pasar yakni pos penerimaan lain-lain. Pos penerimaan ini jumlahnya yang paling besar dibandingkan dengan penerimaan retribusi bulanan pasar dan retribusi harian pasar. Pos penerimaan lain-lain juga memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan retribusi pasar, yaitu rata-rata setiap tahunnya memberikan kontribusi sebesar 34,56%.

Tabel 4.5
Perkembangan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pasar terhadap PAD
Tahun 1995-2009 (Dalam Ribuan)

Tahun	Retribusi Pasar	PAD	Kontribusi (%)
1995	2,048,767	13,490,132	15.19
1996	2,216,154	16,045,102	13.81
1997	2,242,968	22,036,960	10.18
1998	2,650,265	18,762,071	14.13
1999	3,275,775	26,449,412	12.39
2000	3,449,570	24,227,900	14.24
2001	3,575,595	42,528,220	8.41
2002	3,721,418	57,931,300	6.42
2003	5,208,780	63,932,540	8.15
2004	5,441,572	68,646,570	7.93
2005	5,560,148	87,261,580	6.37
2006	5,754,094	98,546,200	5.84
2007	5,771,891	104,870,420	5.50
2008	5,826,912	117,728,890	4.95
2009	5,784,963	113,318,410	5.11

Sumber: Data Retribusi Pasar tahun 1995-2009 dari Dinas Pasar Kota Padang
Data PAD tahun 1995-2009 dari Badan Pusat Statistik Kota Padang,
berbagai edisi. (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, kontribusi retribusi pasar terhadap PAD ternyata menunjukkan angka yang masih relatif kecil selama periode 1995-2009. Penerimaan retribusi pasar pertumbuhannya setiap tahun mengalami fluktuasi. Kontribusi Penerimaan retribusi pasar terhadap PAD yang paling besar yaitu pada tahun 1995 sebesar 15,19% hal ini disebabkan terjadinya peningkatan penerimaan baik penerimaan dari retribusi bulanan pasar dan retribusi harian pasar. Sedangkan kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap PAD yang paling rendah yaitu pada tahun 2008 yaitu sebesar 4,95%, hal ini diduga terjadinya peningkatan terhadap penerimaan PAD, namun bukan dari retribusi pasar melainkan berasal dari pajak daerah.

4.6 Tingkat Efektifitas Retribusi Pasar

Perhitungan efektifitas retribusi pasar ini diperlukan untuk melihat apakah penerimaan retribusi psara sudah efektif atau belum. Adapun perhitungannya dilakukan dengan melihat rasio antara realisasi retribusi pasar dan potensi penerimaannya.

Beberapa penerimaan lainnya diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan retribusi pasar seperti Retribusi Izin Peralihan Hak Pakai (BBN), Retribusi Izin Penjaminan Hak Pakai (Borg), Izin Peningkatan Kualitas Bangunan, Izin Penempatan Payung, Retribusi Izin Peminjaman Hak Pakai (Kontrak), Langganan Listrik, Royalti eks TLA, Royalti Ps Modern, Royalti Ps Bandar Buat, Perubahan Bentuk dan Peningkatan Kualitas, Pendapatan Denda Ret Bulanan Pasar, Piutang Retribusi Harian Pasar. Untuk lebih jelasnya hasil

perhitungan efektifitas retribusi pasar Kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang
Tahun 2005 – 2009

Tahun	Potensi (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
2005	5.896.330.764	5,560,148,780	94.30
2006	5.920.505.720	5,754,094,880	97.19
2007	5.944.779.794	5,771,891,090	97.09
2008	5.969.153.391	5,826,912,210	97.62
2009	6.018.394.824	5,784,963,010	96.12
Rata-rata			96.46

Sumber : Dinas Pasar Kota Padang (Data diolah)

Dari tabel diatas bahwa tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar Kota Padang cukup besar dari tahun 2005–2009. Dimana pada tahun 2008 efektifitasnya mencapai 97,62% yang berarti hanya 2.38% saja potensi yang tidak bisa digali. Kemudian pada tahun 2009 efektifitasnya turun menjadi 96.12%. Efektifitas yang paling rendah terjadi pada tahun 2005 sebesar 94,30%. Hal ini disebabkan karena rendahnya pertumbuhan realisasi tahun 2005. Secara rata-rata tingkat efektifitas penerimaan retribusi pasar Kota Padang dari tahun 2005-2009 adalah sebesar 96,46% pertahun.

4.7 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kota Padang

Ada dua faktor yang diduga mempengaruhi Retribusi Pasar yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah toko. Berikut keterangan dan data mengenai faktor tersebut.

4.7.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dihitung melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan harga berlaku dan berdasarkan harga konstan. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku adalah menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan adalah menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 4.7
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Tahun 2000 serta
Pertumbuhan Ekonomi Kota Padang Tahun 1995-2009

Tahun	PDRB ADHB (Rp)	Pertumbuhan (%)	PDRB ADHK (Rp)	Pertumbuhan (%)
1995	2,452,870,740,000	-	6,230,304,140,000	-
1996	2,913,988,850,000	18.80	6,797,268,140,000	9.10
1997	3,318,668,430,000	13.89	7,513,399,210,000	10.54
1998	5,528,750,950,000	66.60	6,680,861,670,000	-11.08
1999	6,458,255,970,000	16.81	6,795,302,990,000	1.71
2000	7,079,336,540,000	9.62	7,065,516,840,000	3.98
2001	8,043,353,140,000	13.62	7,353,091,210,000	4.07
2002	9,266,699,240,000	15.21	7,721,077,810,000	5.00
2003	10,312,735,980,000	11.29	8,171,842,430,000	5.84
2004	11,508,984,850,000	11.60	8,652,900,060,000	5.89
2005	13,266,059,830,000	15.27	9,110,697,440,000	5.29
2006	15,294,258,130,000	15.29	9,577,495,510,000	5.12
2007	17,369,183,930,000	13.57	10,165,760,800,000	6.14
2008	20,142,222,980,000	15.97	10,797,259,040,000	6.21
2009	21,837,053,980,000	8.41	11,345,637,080,000	5.08
Rata-rata		17,57		4,49

Sumber: Biro Pusat Statistik, Padang Dalam Angka Berbagai Edisi (data diolah).

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai tambah PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya demikian juga dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000. Pada PDRB harga berlaku laju pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1998 yaitu 66,60% atau meningkat sebesar Rp 2,210 trilliun. Peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan masing-masing sektor dan sub sektor pada PDRB harga berlaku, peningkatan sektor yang paling tinggi pada tahun 1998 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 8,41%. Hal ini disebabkan karena telah terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan melanda Indonesia, sehingga berdampak terhadap perekonomian secara nasional maupun daerah. Salah satu bentuknya terwujud dari nilai tambah PDRB yang cenderung menurun dan juga krisis ini berdampak pula terhadap rendahnya kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku memperlihatkan peningkatan pendapatan dari Rp 2,452 triliun rupiah (1995) menjadi Rp 21,837 triliun rupiah (2009) atau dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun adalah sebesar 17,57%.

Pada PDRB atas dasar harga konstan, laju pertumbuhan yang paling tinggi terjadi pada tahun 1997 yaitu 10,54 persen atau meningkat sebesar 716 juta rupiah. Peningkatan ini disebabkan oleh perkembangan masing-masing sektor dan sub sektor pada PDRB harga konstan, peningkatan sektor yang paling tinggi pada tahun 1997 yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan laju pertumbuhan yang paling rendah terjadi pada tahun 1998 yaitu minus sebesar 11,08%. PDRB atas dasar harga konstan memperlihatkan peningkatan pendapatan

dari Rp 6.230 triliun rupiah (1995) menjadi Rp 11.345 triliun rupiah (2009) atau dengan rata-rata laju pertumbuhan pertahun adalah sebesar 4,49%

4.7.2 Jumlah Toko

Jumlah Toko di pasar Kota Padang merupakan salah satu fasilitas yg diberikan oleh Dinas Pasar agar dapat dimanfaatkan oleh pedagang untuk melakukan proses jual beli, selain toko juga terdapat fasilitas lain seperti kios, los dan lain-lain.

Tabel 4.7
Perkembangan Jumlah Toko Tahun 1995-2009
Kota Padang

Tahun	Toko	Kios	Los/MB	Jumlah	Pertumbuhan %
1995	2047	960	1488	4495	-
1996	2047	960	1714	4721	5.03
1997	2047	963	1826	4836	2.44
1998	2047	963	1964	4974	2.85
1999	2050	975	2379	5404	8.64
2000	2050	975	2610	5635	4.27
2001	2050	991	2931	5972	5.98
2002	2050	991	3100	6141	2.83
2003	2050	991	3304	6345	3.32
2004	2050	1033	3337	6420	1.18
2005	2050	1089	3342	6481	0.95
2006	2050	1089	3354	6493	0.19
2007	2050	1093	3369	6512	0.29
2008	2052	1150	3369	6571	0.91
2009	2038	772	1747	4557	-30.65

Sumber: Dinas Pasar Kota Padang (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah toko dalam beberapa tahun diantaranya mengalami penambahan. Pada tahun 1996 tidak ada penambahan petak toko dan kios, namun ada penambahan los sebanyak 226 los

pada Inpres Pasar Timur Tahap II, selanjutnya tahun 1997 terjadi penambahan sebanyak 3 kios dan 112 los di pasar siteba, tahun 1998 terjadi penambahan los sebanyak 138 los di Inpres Pasar Timur Tahap II, tahun 1999 terjadi penambahan lagi sebanyak 3 toko dan 12 kios di pasar Toko Bertingkat Fase III, dan 415 los pada Inpres Pasar Timur Tahap I, selanjutnya tahun 2000 terjadi penambahan di Inpres Pasar Timur Tahap II sebanyak 231 los, kemudian tahun 2001 terjadi penambahan di pasar siteba yaitu sebesar 16 kios dan 8 los di lantai II dan 313 los di Pasar Aton Shopping centre. Selanjutnya terjadi penambahan lagi pada tahun 2002 pada pasar Inpres Pasar Timur Tahap I sebanyak 169 los. Tahun 2003 terjadi penambahan pada Pasar Tanah Kongsu yaitu sebanyak 204 los. Kemudian Tahun 2004 terjadi penambahan pada pasar Inpres I / Belakang Balai Kota dan pasar lubuk Buaya. Untuk pasar Inpres I/ Belakang Balai Kota yaitu sebanyak 30 kios untuk Tukang Pati, sedangkan untuk pasar Lubuk Buaya yaitu sebanyak 12 kios dan 33 los ikan. Tahun 2005 juga dilakukan penambahan pada Plasa Andalas sebesar 56 kios di Utara Bangunan Utama Plasa dan 5 los di Aton Shopping Centre. Tahun 2006 Dinas Pasar melakukan penambahan lagi sebanyak 12 los di pasar Inpres Alai. Selanjutnya terjadi penambahan lagi pada tahun 2007 sebanyak 4 kios dan 15 los pada pasar Lubuk Buaya. Tahun 2008 Dinas Pasar kembali melakukan penambahan kios pada Eks. Locket Terminal Lintas Andalas sebesar 57 kios di Eks. Locket dibelakang Plasa dan 2 toko pada Pasar Raya Barat Tahap III.

Tahun 2009 akibat gempa 30 September mengakibatkan beberapa bangunan pasar hancur dan tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh pedagang yaitu pada pasar Inpres Pasar Timur Tahap I, Inpres Pasar Timur Tahap II, Inpres Pasar Timur Tahap III, Inpres Pasar Timur Tahap IV dan Pertokoan Balai Baru. Pada

pasar Inpres Pasar Timur Tahap I sebanyak 114 kios dan 596 los, Inpres Pasar Timur Tahap II sebanyak 119 kios dan 784 los, Inpres Pasar Timur Tahap III sebanyak 108 kios dan 194 los, Inpres Pasar Timur Tahap IV sebanyak 37 kios dan 48 los, sedangkan untuk Pertokoan Balai Baru sebanyak 14 toko tidak dapat digunakan lagi akibat dari gempa tersebut, sehingga pada tahun 2009 terjadi pengurangan sebesar 14 toko, 378 kios dan 1622 Los, yang mengakibatkan pertumbuhan toko menjadi minus, yaitu sebesar 30,65%.

BAB V

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR

5.1 Analisis Regresi

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk menguji seberapa besar pengaruh dari variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Jumlah Toko) terhadap variabel dependen (Retribusi Pasar). Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat gambaran hasil secara keseluruhan dari proses pengolahan data. Dari output perhitungan program SPSS dapat dibentuk suatu persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$\text{Log } Y = 1,61 + 0,48 \text{ Log } (X_1) + 0,45 \text{ Log } (X_2)$$

(11,06) (2,40)

$$R^2 = 0,958$$

$$F_{\text{hit}} = 135,66$$

5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.979 ^a	.958	.951	.03815	.958	135.665	2	12	.000	1.674

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketetapan yang lebih baik dalam analisis regresi. Tingkat ketetapan regresi ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi R^2 yang besarnya adalah nol dan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Apabila koefisien determinasi R^2 sama dengan nol, berarti variabel-variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Apabila nilai tersebut tidak mendekati satu berarti variabel independen semakin berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan output SPSS diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,958 = 95,8\%$. Hal ini dapat diartikan bahwa penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang secara bersama-sama dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Toko sebesar $95,8\%$. Sedangkan selebihnya yaitu sebesar $4,2\%$ dipengaruhi oleh faktor yang lain.

5.3 Uji t-Tes

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independen mampu mempengaruhi variabel dependen secara individu atau tidak.

Hipotesis yang diajukan :

$H_0 : \beta_i = 0$ (Variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen secara individu)

$H_0 : \beta_i > 0$ (Variabel mempengaruhi variabel dependen secara positif)

Dengan menggunakan tabel t-statistik, maka :

Jika $t\text{-hitung} < t(\alpha, n-k)$ maka H_0 diterima, H_a ditolak

Jika $t\text{-hitung} > t(\alpha, n-k)$ maka H_a diterima, H_0 ditolak

Keterangan :

β_i = Koefisien regresi masing-masing variabel penjelas

k = Jumlah koefisien variabel penjelas

n = Jumlah pengamatan

Bila H_0 ditolak, berarti variabel independen atau variabel penjelas yang bersangkutan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya, dan sebaliknya jika H_0 diterima artinya variabel independen atau variabel penjelas yang bersangkutan tidak signifikan (tidak berpengaruh) terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi di dapat nilai t-hitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan $\alpha = 0,05$ diperoleh nilai t tabel = 2,179.

Coefficients ^a										
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.614	.557		2.899	.013					
X1	.486	.044	.850	11.062	.000	.968	.954	.657	.597	1.675
X2	.453	.188	.185	2.409	.033	.725	.571	.143	.597	1.675

a. Dependent Variable: Y

• Uji-t Variabel Produk Domestik Regional Bruto

t-hitung = 11,062

t-tabel = 2,179

Berdasarkan data t-hitung, t-tabel dan hasil uji yang dilakukan dua sisi menjadi $\frac{1}{2} \alpha$ ($\alpha = 0,05$) diketahui bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($11,062 > 2,179$), maka H_0 ditolak. Artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Pasar. Dimana apabila terjadi kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1 % maka penerimaan retribusi pasar di Kota Padang juga akan meningkat sebesar 11,06 %. Hal ini juga sesuai dengan

hasil penelitian Bambang Sumardana (2001) tentang “Analisis faktor penentu penerimaan retribusi pengelolaan Pasar Kota Surakarta” yang juga menunjukkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi pengelolaan pasar, artinya meningkatnya variabel Produk Domestik Regional Bruto akan mempengaruhi peningkatan variabel retribusi pasar. Selanjutnya penelitian Tatik Yuliningsih (2002) tentang “Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Purbalingga” yang mana penelitian ini menggunakan analisis efektifitas dan elastisitas retribusi pasar terhadap PDRB, hasil dari penelitian ini menunjukkan elastisitas penerimaan retribusi pasar terhadap PDRB menunjukkan hubungan yang elastis yang berarti bahwa setiap kenaikan 1% dari PDRB akan menyebabkan kenaikan penerimaan retribusi pasar sebesar 2,02%.

- **Uji-t Variabel Jumlah Toko**

$$t\text{-hitung} = 2,409$$

$$t\text{-tabel} = 2,179$$

Berdasarkan data t-hitung, t-tabel dan hasil uji yang dilakukan dua sisi menjadi $\frac{1}{2} \alpha$ ($\alpha = 0,05$) diketahui bahwa $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($2,409 > 2,179$), maka H_0 ditolak. Artinya jumlah toko berpengaruh signifikan terhadap Retribusi Pasar. Apabila terjadi kenaikan sebesar 1 % maka penerimaan retribusi pasar di Kota Padang juga akan mengalami peningkatan sebesar 2,40%. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ave Kusumawati (2005) tentang “Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kartasura terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo” yang juga menunjukkan bahwa pengaruh variabel jumlah los terhadap penerimaan retribusi pelayanan pasar Kartasura bernilai positif, artinya

meningkatnya variabel jumlah los akan mempengaruhi pula pada peningkatan yang terjadi pada variabel retribusi pelayanan pasar.

Dari kedua variabel independen tersebut yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah toko memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar. Namun variabel yang paling mempengaruhi penerimaan retribusi pasar adalah Produk Domestik Regional Bruto(PDRB).

5.4 Uji F-Tes

Uji F statistik dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara serentak dari variabel bebas yaitu Uji F statistik dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara serentak dari variabel bebas yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (X_1) dan Jumlah toko (X_2) terhadap Retribusi Pasar (Y).

Hipotesa : $H_0 : b_i = 0$

$H_a : b_i \neq 0$

Kriteria pengujian :

H_0 diterima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$.

H_a diterima jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$.

$\alpha = 5\%$

$$V1 : k-1 ; 5-1 = 4$$

$$V2 : n-k ; 17-5 = 12$$

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.395	2	.197	135.665	.000 ^a
	Residual	.017	12	.001		
	Total	.412	14			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

$$F\text{-hitung} = 135,66$$

$$F\text{-tabel} = 3,89$$

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa nilai F-hitung (135,66) > F-tabel (3,89). Artinya secara bersama-sama variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) dan Jumlah Toko (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar di Kota Padang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pasar dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan rata-rata penerimaan retribusi pasar setiap tahunnya selama tahun 1995-2009 adalah sebesar 8,15%. Pertumbuhan retribusi pasar masih dianggap rendah, disebabkan karena pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan tarif retribusi yang masih rendah.
2. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,958. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 95,8%, dan sisanya sebesar 4,2 % dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.
3. Produk Domestik Regional Bruto dengan derajat $\alpha = 5\%$ menunjukkan hubungan positif dan signifikan dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($11,06 > 2,17$), artinya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar.
4. Jumlah toko di Pasar dengan $\alpha = 5\%$ dimana nilai t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel ($2,40 > 2,17$). Artinya jumlah toko di Pasar berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Retribusi Pasar.
5. Dari hasil pengujian keseluruhan (Uji F), nilai F-Hitung adalah lebih besar dari F-Tabel ($135,66 > 3,89$). Artinya semua variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah toko) secara keseluruhan

mempunyai hubungan yang signifikan terhadap variabel dependen (Retribusi Pasar).

6.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis dapat menyimpulkan saran yang perlu mendapat perhatian :

1. Pemerintah daerah Kota Padang perlu mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu dengan upaya peningkatan nilai tambah PDRB yang dominan, seperti sektor Perdagangan
2. Untuk meningkatkan penerimaan retribusi pasar, Dinas Pasar perlu mengatur jumlah toko dan menata lokasi pasar sehingga tarifnya bisa lebih meningkat.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel analisis dan periode waktu analisisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2000-2009. *Padang Dalam Angka*. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat.
- Davey, KJ. (Terjemahan Amanullah). 1988. *Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek Internasional dan relevansinya bagi dunia ketiga*. Jakarta : UI Press.
- Dinas Pasar. 2000-2009. *Laporan Tahunan Realisasi Penerimaan Pasar dan Data Petak Toko*. Padang
- Gitusudarmo. 1992. Indriyo. *Pengantar Bisnis*. Yogyakarta : BPFE
- Goedhart. 1975. *Garis-garis Besar Ilmu Keuangan Negara*. Terjemahan Hatmoko. Jakarta
- Gujarati, Damodar. 1995. *Dasar-Dasar Ekonometrika* alih bahasa Sumarno Zain. Jakarta : Erlangga.
- Haritz, Benyamin. 1995. *Peran Adminstrator Pemerintah Daerah, Dalam Prisma 4, April*. Jakarta.
- J.B. Kristiadi. 1985. *Masalah Sekitar Peningkatan Pendapatan Daerah*. Prisma No. 12, Tahun XIV. Jakarta LP3ES
- Kaho. 1998. *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia "Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya"*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kamaludin. 1992. *Bunga Rampai Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah*. Jakarta : FE-UI
- Kuncoro. 2001. *Metode Kuantitatif (Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis dan Ekonomi) Edisi Pertama*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kusumawati. 2005. *Kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar di Kartasura terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo*, Sukoharjo.
- Lains. 1985. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*; Majalah Prisma No 4 Tahun XIV.

- Musgrave. 1990. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek (Edisi 5)*. Jakarta : PT. Erlangga
- Notoatmodjo. 1992. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pamudji. 1980. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta : Ichtiar
- Santosa. 1995. *Retribusi Pasar Sebagai PAD*. Prisma.
- Soedargo. 1964. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Eresco
- Soeroto. 1986. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Tenaga Kerja*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Soetrisno. 1986. *Ekonomi Publik II*. Jakarta : Karunika
- Supriyatna. 1992. *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sumardana. 2001. *Analisis faktor penentu penerimaan retribusi pengelolaan Pasar Kota Surakarta*. Surakarta
- Wijaya. 1990. *Ekonomi Makro*. Yokyakarta : BPFE
- Yuliningsih. 2002. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Pasar Kabupaten Purbalingga*. Purbalingga.
- Zainun. 1985. *Perencanaan dan Pembinaan Tenaga Kerja*. Ghalia Indonesia.
- Putranto. 2007. *Retribusi Pelayanan Pasar Banget Ayu dan Peterongan Kota Semarang*. Semarang.
- Setyaningsih. 2009. *Evaluasi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Surakarta*. Surakarta.
- Pambudi. 1999. *Analisis Penentuan Tarif Retribusi Pasar (Kasus Pasar Induk Brebes Daerah Kabupaten Brebes)*. Brebes.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

----- Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

----- Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Y	9.5903	.17163	15
X1	12.9277	.30037	15
X2	3.7383	.07016	15

Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Y	1.000	.968	.725
	X1	.968	1.000	.635
	X2	.725	.635	1.000
Sig. (1-tailed)	Y	.	.000	.001
	X1	.000	.	.006
	X2	.001	.006	.
N	Y	15	15	15
	X1	15	15	15
	X2	15	15	15

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X2, X1 ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.979 ^a	.958	.951	.03815	.958	135.665	2	12	.000	1.674

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1. Regression	.395	2	.197	135.665	.000 ^a
Residual	.017	12	.001		
Total	.412	14			

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1 (Constant)	1.614	.557		2.899	.013					
X1	.486	.044	.850	11.062	.000	.968	.954	.657	.597	1.675
X2	.453	.188	.185	2.409	.033	.725	.571	.143	.597	1.675

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X1	X2
1	1	3.000	1.000	.00	.00	.00
	2	.000	109.111	.64	.58	.00
	3	.000	151.461	.36	.42	1.00

a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	9.2890	9.8092	9.5903	.16795	15
Residual	-.06132	.05571	.00000	.03532	15
Std. Predicted Value	-1.794	1.303	.000	1.000	15
Std. Residual	-1.607	1.460	.000	.926	15

a. Dependent Variable: Y

LAMPIRAN II

Perkembangan Retribusi Pasar, Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan Jumlah Toko Tahun 1995 - 2009 di Kota Padang

No	Tahun	Retribusi Pasar (Rp)	LOG Retribusi Pasar	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Rp)	LOG PDRB ADH Berlaku	Jumlah Toko	LOG Jumlah Toko
1	1995	2,048,767,000	9.31149	2,452,870,740,000	12.38967	4495	3.65273
2	1996	2,216,154,000	9.34560	2,913,988,850,000	12.46449	4721	3.67403
3	1997	2,242,968,000	9.35082	3,318,668,430,000	12.52096	4836	3.68449
4	1998	2,650,265,000	9.42329	5,528,750,950,000	12.74263	4974	3.69671
5	1999	3,275,775,000	9.51531	6,458,255,970,000	12.81012	5404	3.73272
6	2000	3,449,570,000	9.53776	7,079,336,540,000	12.84999	5635	3.75089
7	2001	3,575,595,000	9.55335	8,043,353,140,000	12.90544	5972	3.77612
8	2002	3,721,418,590	9.57071	9,266,699,240,000	12.96693	6141	3.78824
9	2003	5,208,780,570	9.71674	10,312,735,980,000	13.01337	6345	3.80243
10	2004	5,441,572,540	9.73572	11,508,984,850,000	13.06104	6420	3.80754
11	2005	5,560,148,780	9.74509	13,266,059,830,000	13.12274	6481	3.81164
12	2006	5,754,094,880	9.75998	15,294,258,130,000	13.18453	6493	3.81245
13	2007	5,771,891,090	9.76132	17,369,183,930,000	13.23978	6512	3.81371
14	2008	5,826,912,210	9.76544	20,142,222,980,000	13.30411	6571	3.81763
15	2009	5,784,963,010	9.76230	21,837,053,980,000	13.33919	4557	3.65868

Sumber : Dinas Pasar dan Badan Pusat Statistik Kota Padang (Data Diolah)

LAMPIRAN III

**PDRB KOTA PADANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
DARI TAHUN 1995 – 2009 (MILYARAN RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1. PERTANIAN	93,89	114,44	117,19	204,82	251,22	272,76	311,65	474,36
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	53,18	66,12	103,27	109,34	114,30	119,49	132,05	155,92
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	526,64	674,09	724,35	1.083,99	1.104,26	1.147,24	1.276,39	1.590,33
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	39,48	55,91	69,08	98,39	122,27	155,32	195,29	189,49
5. BANGUNAN	104,13	131,65	199,57	273,42	263,62	294,38	342,90	381,27
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	507,45	583,35	648,07	1.253,68	1.511,33	1.659,43	1.890,07	2.016,77
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	601,99	705,84	802,73	1.403,40	1.731,76	1.928,05	2.227,04	2.264,32
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	211,52	225,29	245,87	408,63	457,52	504,38	573,25	673,68
9. JASA-JASA	314,55	357,27	408,50	692,02	901,94	998,27	1.094,71	1.520,55
PDRB	2.452,87	2.913,98	3.318,66	5.528,75	6.458,25	7.079,33	8.043,35	9.266,69

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat

**PDRB KOTA PADANG BERDASARKAN HARGA BERLAKU MENURUT LAPANGAN USAHA
DARI TAHUN 1995 – 2009 (MILYAR RUPIAH)**

LAPANGAN USAHA	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. PERTANIAN	522,26	560,61	677,83	835,71	978,25	1.160,39	1.250,73
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	166,89	188,04	217,09	259,84	300,94	352,03	381,05
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.698,31	1.834,52	2.022,96	2.396,87	2.668,74	3.072,48	3.269,94
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	248,74	271,14	310,73	350,45	392,70	434,84	456,83
5. BANGUNAN	427,27	498,69	592,09	714,39	792,99	912,13	994,63
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	2.216,89	2.487,99	2.827,73	3.147,23	3.607,72	4.207,80	4.553,22
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	2.570,90	2.871,14	3.390,74	3.797,92	4.251,10	4.867,88	5.307,50
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	763,41	915,51	1.050,89	1.256,82	1.467,68	1.736,04	1.912,89
9. JASA-JASA	1.698,05	1.881,29	2.175,96	2.534,97	2.909,02	3.398,64	3.710,27
PDRB	10.312,73	11.508,98	13.266,05	15.294,25	17.369,18	20.142,22	21.837,05

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat

LAMPIRAN IV

Perkembangan Jumlah Toko Tahun 1995-2009 Kota Padang

Tahun	Toko	Kios	Los/MB	Jumlah
1995	2047	960	1488	4495
1996	2047	960	1714	4721
1997	2047	963	1826	4836
1998	2047	963	1964	4974
1999	2050	975	2379	5404
2000	2050	975	2610	5635
2001	2050	991	2931	5972
2002	2050	991	3100	6141
2003	2050	991	3304	6345
2004	2050	1033	3337	6420
2005	2050	1089	3342	6481
2006	2050	1089	3354	6493
2007	2050	1093	3369	6512
2008	2052	1150	3369	6571
2009	2038	772	1747	4557

Sumber: Dinas Pasar Kota Padang

LAMPIRAN V

CARA PERHITUNGAN POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2005 = Rp 5.896.330.764

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2009 = Rp 6.018.394.824

$$\begin{aligned} P_n &= P_o (1 + r)^n \\ \text{Potensi 2009} &= \text{Potensi 2005} (1 + r)^n \\ 6.018.394.824 &= 5.896.330.764 (1 + r)^5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r &= \sqrt[5]{\frac{P_n}{P_o}} - 1 \\ &= \sqrt[5]{\frac{6.018.394.824}{5.896.330.764}} - 1 \end{aligned}$$

$$r = 0,0041$$

$$r = 0,41\%$$

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2006 :

$$\begin{aligned} \text{Potensi 2006} &= \text{Potensi 2005} \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.896.330.764 \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.920.505.720 \end{aligned}$$

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2007 :

$$\begin{aligned} \text{Potensi 2007} &= \text{Potensi 2006} \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.920.505.720 \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.944.779.794 \end{aligned}$$

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Tahun 2008 :

$$\begin{aligned} \text{Potensi 2008} &= \text{Potensi 2007} \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.944.779.794 \times 1,0041 \\ &= \text{Rp } 5.969.153.391 \end{aligned}$$

LAMPIRAN VI

Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar Tahun 2005

No	Lokasi	Potensi / Bulan / Hari	Potensi / Tahun
1	Retribusi Bulanan		
	Fase I s/d VII		
	Pasar Raya Barat	106,120,144	1,273,441,728
	Pasar Pembantu	136,959,114	1,643,509,368
		135,271,639	1,623,259,668
	Jumlah	378,350,897	4,540,210,764
2	Retribusi Harian	3,231,000	1,163,160,000
3	Kakus / WC Umum	536,000	192,960,000
	Total	382,117,897	5,896,330,764

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

**Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
Tahun 2005**

Retribusi Bulanan

No	Lokasi	Luas	Tarif Rata-rata	Potensi
1	Toko Bertingkat Fase I Lantai 1	2560	3416	8,744,960
2	Toko Bertingkat Fase I Lantai 2	2816	1533	4,316,928
3	Toko Bertingkat Fase II Lantai 1	2353	3416	8,037,848
4	Toko Bertingkat Fase II Lantai 2	2275	1550	3,526,250
5	Toko Bertingkat Fase III Lantai 1	2502	3416	8,546,832
6	Toko Bertingkat Fase III Lantai 2	2955	1550	4,580,250
7	Toko Bertingkat Fase IV Lantai 1	2944	3750	11,040,000
8	Toko Bertingkat Fase IV Lantai 2	2860	1550	4,433,000
9	Toko Bertingkat Fase V Lantai 1	2842	3750	10,657,500
10	Toko Bertingkat Fase V Lantai 2	2990	1550	4,634,500
11	Toko Bertingkat Fase VI Lantai 1	2886	3416	9,858,576
12	Toko Bertingkat Fase VI Lantai 2	2725	1550	4,223,750
13	Toko Bertingkat Fase VII Lantai 1	4125	3416	14,091,000
14	Toko Bertingkat Fase VII Lantai 2	3970	2375	9,428,750
Total Fase I s/d VII		40803		106,120,144
15	Pasar Raya Barat Tahap I Lantai I	7312	3638	26,601,056
16	Pasar Raya Barat Tahap II Lantai 1	6812	3857	26,273,884
17	Pasar Raya Barat Tahap III Lantai 1	6427	3833	24,634,691
18	Lapangan Pasar Raya Barat	4751	2750	13,065,250
19	Pertokoan Blok A Lantai 1	2774	3416	9,475,984
20	Pertokoan Blok A Lantai 2	2985	3833	11,441,505
21	Pertokoan Rajawali Lantai 1	2841	3833	10,889,553
22	Pertokoan Rajawali Lantai 2	2756	4000	11,024,000
23	Aton Shopping centre	927	3833	3,553,191
Total Barat		37585		136,959,114
24	Inpres Pasar Timur Tahap I	4526	2500	11,315,000
25	Inpres Pasar Timur Tahap II	4453	2500	11,132,500
26	Inpres Pasar Timur Tahap III	3526	2500	8,815,000
27	Inpres Pasar Timur Tahap IV	3196	2500	7,990,000
28	Pertokoan Balai Baru	3040	3833	11,654,282
29	Pasar Lubuk Buaya Tahap I	3588	2375	8,521,500
30	Pasar Lubuk Buaya Tahap II	2947	2500	7,367,500
31	Pasar Bandar Buat Tahap I	3684	2625	9,670,500
32	Pasar Bandar Buat Tahap II	2920	2625	7,665,000
33	Pasar Bandar Buat Tambahan	1863	2750	5,123,250
34	Pasar Tanah Kongsu	3265	2500	8,162,500
35	Pasar Ulak Karang	3210	2500	8,025,000
36	Pasar Simpang Haru	1019	2500	2,548,125
37	Pasar Inpres Alai	3142	2861	8,989,608
38	Pasar Inpres Siteba	5867	2500	14,666,875
39	Inpres I / Belakang Balai Kota	1450	2500	3,625,000
Total Pasar Pembantu		51696		135,271,639
Total Retribusi Bulanan		130084		378,350,897

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

**erhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
Tahun 2009**

Retribusi Harian

No	Lokasi	Jumlah Los	Tarif	Potensi
1	Pasar Raya Barat	70	1000	70,000
2	Aton Shopping Centre	442	1000	442,000
3	Inpres Pasar Timur Tahap I	596	1000	596,000
4	Inpres Pasar Timur Tahap II	784	1000	784,000
5	Inpres Pasar Timur Tahap III	194	1000	194,000
6	Inpres Pasar Timur Tahap IV	48	1000	48,000
7	Pasar Lubuk Buaya Tahap I	104	1000	104,000
8	Pasar Lubuk Buaya Tahap II	124	1000	124,000
9	Pasar Bandar Buat Tahap I	60	1000	60,000
10	Pasar Bandar Buat Tahap II	80	1000	80,000
11	Pasar Tanah Kongsi	239	1000	239,000
12	Pasar Ulak Karang	80	1000	80,000
13	Pasar Simpang Haru	90	1000	90,000
14	Pasar Inpres Alai	168	1000	168,000
15	Pasar Inpres Siteba	152	1000	152,000
	Total Retribusi Harian	3231		3,231,000

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

**Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar**

Kakus / WC Umum

No	Lokasi	Potensi	Tarif	Potensi
1	Blok A Lantai I	61	500	30,500
2	Fase VII Lantai I	275	500	137,500
3	Aton Shoping Centre	10	500	5,000
4	Fase V Lantai II	84	500	42,000
5	Fase I Lantai II	67	500	33,500
6	Pasar Raya Barat Tahap I	352	500	176,000
7	Pasar Alai	8	500	4,000
8	Pasar Raya Barat Tahap II	202	500	101,000
9	Pasar Lubuk Buaya	8	500	4,000
10	Pasar Siteba	5	500	2,500
	Total	1072		536,000

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
Tahun 2009

No	Lokasi	Potensi / Bulan / Hari	Potensi / Tahun
1	Retribusi Bulanan		
	Fase I s/d VII		
	Pasar Raya Barat	106,139,225	1,273,670,700
	Pasar Pembantu	136,980,068	1,643,760,816
		140,261,639	1,683,139,668
	Jumlah	383,380,932	4,600,571,184
2	Retribusi Harian	3,369,000	1,212,840,000
3	Kakus / WC Umum	569,399	204,983,640
	Total	387,319,331	6,018,394,824

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

Retribusi Bulanan

No	Lokasi	Luas	Tarif Rata-rata	Potensi
1	Toko Bertingkat Fase I Lantai 1	2561	3417	8,749,409
2	Toko Bertingkat Fase I Lantai 2	2816	1533	4,318,593
3	Toko Bertingkat Fase II Lantai 1	2353	3417	8,040,928
4	Toko Bertingkat Fase II Lantai 2	2276	1550	3,527,304
5	Toko Bertingkat Fase III Lantai 1	2502	3417	8,550,148
6	Toko Bertingkat Fase III Lantai 2	2955	1550	4,580,250
7	Toko Bertingkat Fase IV Lantai 1	2944	3750	11,040,000
8	Toko Bertingkat Fase IV Lantai 2	2860	1550	4,433,000
9	Toko Bertingkat Fase V Lantai 1	2842	3750	10,657,500
10	Toko Bertingkat Fase V Lantai 2	2990	1550	4,634,500
11	Toko Bertingkat Fase VI Lantai 1	2886	3417	9,860,510
12	Toko Bertingkat Fase VI Lantai 2	2725	1550	4,223,750
13	Toko Bertingkat Fase VII Lantai 1	4125	3417	14,094,584
14	Toko Bertingkat Fase VII Lantai 2	3970	2375	9,428,750
	Total Fase I s/d VII	40806		106,139,225
15	Pasar Raya Barat Tahap I Lantai I	7312	3639	26,607,564
16	Pasar Raya Barat Tahap II Lantai I	6812	3857	26,274,838
17	Pasar Raya Barat Tahap III Lantai I	6428	3833	24,638,997
18	Lapangan Pasar Raya Barat	4751	2750	13,065,250
19	Pertokoan Blok A Lantai 1	2775	3417	9,480,029
20	Pertokoan Blok A Lantai 2	2985	3833	11,443,103
21	Pertokoan Rajawali Lantai 1	2841	3833	10,890,491
22	Pertokoan Rajawali Lantai 2	2756	4000	11,024,000
23	Aton Shopping centre	928	3833	3,555,797
	Total Barat	37587		136,980,068
24	Inpres Pasar Timur Tahap I	4526	2500	11,315,000
25	Inpres Pasar Timur Tahap II	4453	2500	11,132,500
26	Inpres Pasar Timur Tahap III	3526	2500	8,815,000
27	Inpres Pasar Timur Tahap IV	3196	2500	7,990,000
28	Pertokoan Balai Baru	3040	3833	11,654,282
29	Pasar Lubuk Buaya Tahap I	3588	2375	8,521,500
30	Pasar Lubuk Buaya Tahap II	2947	2500	7,367,500
31	Pasar Bandar Buat Tahap I	3684	2625	9,670,500
32	Pasar Bandar Buat Tahap II	2920	2625	7,665,000
33	Pasar Bandar Buat Tambahan	1863	2750	5,123,250
34	Pasar Tanah Kongsu	3265	2500	8,162,500
35	Pasar Ulak Karang	3210	2500	8,025,000
36	Pasar Simpang Haru	1019	2500	2,548,125
37	Pasar Inpres Alai	3142	2861	8,989,608
38	Pasar Inpres Siteba	5867	2500	14,666,875
39	Inpres I / Belakang Balai Kota	1450	2500	3,625,000
40	Eks Loket Terminal Lintas Andalas	1996	2500	4,990,000
	Total Pasar Pembantu	53692		140,261,639
	Total Retribusi Bulanan	132085		383,380,933

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar
Tahun 2009

Retribusi Harian

No	Lokasi	Jumlah Los	Tarif	Potensi
1	Pasar Raya Barat	70	1000	70,000
2	Aton Shopping Centre	442	1000	442,000
3	Inpres Pasar Timur Tahap I	596	1000	596,000
4	Inpres Pasar Timur Tahap II	784	1000	784,000
5	Inpres Pasar Timur Tahap III	194	1000	194,000
6	Inpres Pasar Timur Tahap IV	48	1000	48,000
7	Pasar Lubuk Buaya Tahap I	104	1000	104,000
8	Pasar Lubuk Buaya Tahap II	124	1000	124,000
9	Pasar Bandar Buat Tahap I	60	1000	60,000
10	Pasar Bandar Buat Tahap II	80	1000	80,000
11	Pasar Tanah Kongsu	239	1000	239,000
12	Pasar Ulak Karang	80	1000	80,000
13	Pasar Simpang Haru	90	1000	90,000
14	Pasar Inpres Alai	168	1000	168,000
15	Pasar Inpres Siteba	152	1000	152,000
16	Eks Loret Terminal Lintas Andalas	138	1000	138,000
	Total Retribusi Harian	3369		3,369,000

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)

**Perhitungan Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Menurut Lokasi dan Klasifikasinya
Perda 08 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Pasar**

Kakus / WC Umum

No	Lokasi	Potensi	Tarif	Potensi
1	Blok A Lantai I	66	500	33,000
2	Fase VII Lantai I	300	500	150,000
3	Aton Shopping Centre	15	500	7,500
4	Fase V Lantai II	89	500	44,366
5	Fase I Lantai II	72	500	36,000
6	Pasar Raya Barat Tahap I	357	500	178,667
7	Pasar Alai	13	500	6,667
8	Pasar Raya Barat Tahap II	207	500	103,333
9	Pasar Lubuk Buaya	13	500	6,333
10	Pasar Siteba	7	500	3,333
	Total	1138		569,199

Sumber : Dinas Pasar (Data diolah)